

**PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN UN *TOURISM* DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA**

TAHUN 2021-2024

*PARADIPLOMACY OF BALI PROVINCE AND UN TOURISM IN THE
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM 2021-2024*

Diajukan Guna Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Untuk
Meraih Gelar Kesarjanaan Strata-1 (S1) Pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Dengan Spesialisasi
Hubungan Internasional



Disusun Oleh :

Diana Warmasen

146420121013

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

**Nama: Diana Warmasen
NIM: 146420121013**

**Telah Disetujui Tim Pembimbing
Pada 17 Februari 2025**

Pembimbing I

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. (.....)
NIDN. 1420089201



Pembimbing II

Try Danuwijaya, M.H.I. (.....)
NIDN. 1407129201



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Warmasen
NIM : 146420121013
Judul penelitian : Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tersebut.

Sorong, 22 April 2025

Yang membuat pernyataan,


Diana Warmasen

146420121013

LEMBAR PENGESAHAN
PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN *UN TOURISM* DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA BUDAYA

Nama: Diana Warmasen

NIM: 146420121013

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 22 April 2025


Dekan FHSIPOL

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NID.N. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201


(.....)

2. Try Danuwijaya, M.H.I.
NIDN. 1407129201


(.....)

3. Etik Siswatiningrum, M.H.I.
NIDN. 1409018401


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradiplomasi provinsi bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa paradiplomasi yang dilakukan oleh Provinsi Bali dan UN *Tourism* menghasilkan program-program yang dapat menjadi alat dalam pengembangan pariwisata budaya yakni, *Gastronomi Tourism Club* dan *Best Village Tourism*. Program-program ini memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat lokal, mendukung pengembangan ekonomi lokal, promosi budaya bali, perlindungan warisan budaya dunia serta peningkatan infrastruktur. Melalui paradiplomasi, Bali tidak hanya mengembangkan sistem dan standar pariwisata yang lebih baik, tetapi juga membuka akses ke pelatihan, pendanaan, dan promosi global. Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali juga terbukti mampu mengatasi tantangan pariwisata masa kini, seperti *overtourism*, degradasi budaya, dan ketimpangan manfaat ekonomi.

Kata Kunci : Paradiplomasi, UN *Tourism*, Pemerintah Provinsi Bali ,*Gastronomi Tourism Club*, *Best Village Tourism*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya." Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran paradiplomasi dalam meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Provinsi Bali, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti UN Tourism. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata internasional yang kaya akan budaya, Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sepanjang proses penelitian. Bapak Try Danuwijaya, M.H.I. sebagai pembimbing pendamping, yang juga memberikan masukan dan panduan yang sangat berharga. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Saya berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan studi paradiplomasi, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata budaya di Bali, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan topik serupa. Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa depan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu

Markus 11:24

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat dan kekuatan, yang telah memberikan kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya selama saya menyelesaikan skripsi ini
2. Orang Tua saya tercinta, Yona Warmasen, S.E dan Dorthea Abaire yang telah memberikan cinta, doa dan dukungan tak terhingga, serta menjadi pilar kekuatan saya dalam perjalanan ini
3. Dosen pembimbing skripsi ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I dan Bapak Try Danuwijaya, M.H.I. yang penuh kasih dan sabar yang telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I. selaku Ka.Prodi Hubungan Internasional yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis.
5. Sahabat penulis Paulina Klasjok, Ruce Sangkek, Nathalia Fonataba, Helena Yembise, Menase Blesia, Syafira Maharani Suara, Fransiskus Xaverius Runaki, dan Desy Natalia Dorkas Fawan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada keluarga besar Warmasen dan Abaire atas dukungan dan motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pasukan doom , Inseren Pina, Tapus, Olin, Yuliana, Grace yang sudah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.
8. Teman-teman Program Studi Hubungan Internasional angkatan 2 yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu kos yang telah memberikan penulis tempat tinggal, dukungan selama menyelesaikan skripsi.
10. Zayn Malik, J Cole, K3bi, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi dan mewarnai hari-hari penulis dengan karya-karyanya

11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.4.1 Manfaat Akademik.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 PENELITIAN TERDAHULU.....	8
1.6 KERANGKA ANALISIS	14
1.6.1 Teori Diplomasi Publik.....	14
1.6.2 Konsep Paradiplomasi.....	17
1.7 METODE PENELITIAN.....	20
1.7.1 Tipe Penelitian	20
1.7.2 Unit Analisa	20
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7.4 Teknik Analisis Data.....	21
1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	22
1.8 ARGUMEN POKOK.....	22
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN.....	23

1.9.1	BAB 1 PENDAHULUAN	23
1.9.2	BAB II PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA	23
1.9.3	BAB III PENGARUH UN <i>TOURISM</i> DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA.....	24
1.9.4	BAB IV PARADIPLOMASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISU SOSIAL DAN EKONOMI YANG DIHASILKAN OLEH PARIWISATA BUDAYA	24
1.9.5	BAB V PENUTUP.....	24
BAB II.....		25
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI DI INDONESIA.....		25
2.1	Perkembangan Praktik Paradiplomasi di Indonesia.....	25
2.1.2	Aktor Pelaksana Paradiplomasi di Provinsi Bali	28
2.1.3	Otonomi Daerah dan Paradiplomasi di Provinsi Bali	32
2.2	Kontribusi Paradiplomasi dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Bali	39
2.3	Hubungan UN Tourism –Indonesia	41
2.3.1	Bergabungnya Indonesia dengan UN <i>Tourism</i>	41
2.3.3	Kolaborasi Provinsi Bali dengan UN <i>Tourism</i>	44
2.3.4	Peran UN Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya	49
2.4	Potensi Pariwisata Budaya Provinsi Bali	51
2.4.1	Keunggulan Wisata Budaya.....	55
2.4.3	Implementasi Provinsi Bali dalam Pengembangan Pariwisata Budaya melalui Kebijakan Pemerintah Provinsi	59
BAB III		65
IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN UN TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA.....		65
3.1	Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya.....	65
3.1.2	Gastronomy Tourism Club.....	65
3.1.3	<i>Best Village</i> Desa Wisata Jatiluwih	67
3.2	Alasan Pemerintah Provinsi Bali Melakukan Paradiplomasi.....	69

3.2.1	<i>Cultural Distinctiveness and Nationalism</i>	69
3.2.2	<i>International Policies (Kebijakan Internasional)</i>	74
3.2.3	<i>Legal Framework</i>	77
BAB IV	81
ANALISIS PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN UN TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA		81
4.1	Pengaruh Program Gastronomy Tourism Club terhadap Pengembangan Wisata Kuliner di Bali.....	81
4.2	Pengaruh Program Best Tourism Villages terhadap Desa Jatiluwih	82
4.3	Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya.....	83
4.3	Dampak Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya.....	86
BAB V	88
PENUTUP.....		88
5.1	Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA		xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aktor Paradiplomasi 1	29
Tabel 2.2 Kedatangan Wisman Langsung ke 1.....	55
Tabel 3.1 Tabel Jumlah UMKM 1	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Asia Pacific Conference 1	48
Gambar 2.2 Desa Jatiluwih 1	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.3 Pura Tanah Lot 1	57
Gambar 2.4 Pura Ulun Danu Beratan 1	58
Gambar 2.5 Pura Lempuyang 1	59
Gambar 3.1 Workshop for UNWTO Gastronomy 1	67
Gambar 3.2 Best Tourism Village 1	69

DAFTAR ISTILAH

AR (*Augmented Reality*): Teknologi yang menggabungkan elemen virtual dengan dunia nyata secara interaktif melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR.

BICC (*Bali International Convention Center*): salah satu pusat konvensi terbesar di Bali yang terletak di kawasan Nusa Dua.

BNDCC (*Bali Nusa Dua Convention Center*): pusat konferensi kelas dunia yang sering digunakan untuk pertemuan tingkat tinggi, pameran, dan acara korporasi.

CBT (*Community-Based Tourism*): konsep pariwisata berbasis komunitas yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata.

CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*): Standar protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang diterapkan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

CITY BRANDING : Strategi pemasaran yang digunakan oleh sebuah kota untuk membangun dan mempromosikan identitasnya guna menarik wisatawan, investor, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

DIGITAL TOURISM : konsep pemanfaatan teknologi digital dalam industri pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, efisiensi layanan, dan daya saing destinasi wisata.

ECO TOURISM: Pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi bagi wisatawan.

FULL POWER LETTER : Surat resmi atau dokumen tertulis dengan kekuatan penuh yang memberikan otoritas, pernyataan, atau izin tertentu kepada penerimanya.

GASTRONOMY : ilmu dan seni yang berkaitan dengan makanan dan budaya kuliner.

GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*): Organisasi global yang menetapkan standar dan pedoman untuk pariwisata berkelanjutan.

IFTM (*International French Travel Market*) : Platform internasional dinamis yang mempertemukan para pemikir, inovator, dan pemimpin industri yang paling kreatif dari tingkat nasional dan internasional

INTERNATIONAL POLICIES : Serangkaian tujuan strategis dan tindakan suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain, perserikatan, dan entitas internasional.

LEGAL FRAMEWORK : Sistem hukum yang menjadi dasar bagi aturan dan regulasi dalam suatu negara, industri, atau organisasi.

LEGAL POLICY : kebijakan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

MOU (Memorandum of Understanding) : Dokumen yang menyatakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih.

NGO (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS): Organisasi Non-Pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) adalah organisasi nirlaba yang beroperasi secara independen dari pemerintah.

PARADIPLMACY : Keterlibatan pemerintah daerah atau sub-nasional dalam hubungan internasional.

SISTER CITY : Perjanjian antara dua kota di negara yang berbeda untuk mempromosikan pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi.

SISTER PROVINCE : Konsepnya mirip dengan *Sister City*, tetapi melibatkan wilayah yang lebih besar yaitu setingkat provinsi atau daerah administratif tingkat tinggi lainnya.

UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATIONS): Badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi.

UN TOURISM : Badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan inklusif, dan kelestarian lingkungan.

UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH): Istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh

perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal aset dan pendapatan tahunan

WONDERFUL INDONESIA : Kampanye pariwisata yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenparekraf) untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata utama di dunia

WWF (*WORLD WATER FORUM*) : Forum internasional terbesar di dunia yang membahas isu-isu terkait air dan sanitasi secara global.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Saat ini, sektor pariwisata Indonesia menyumbang sekitar 4% terhadap total perekonomian nasional. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi ini hingga dua kali lipat, mencapai 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mencapai target tersebut, jumlah wisatawan perlu meningkat dua kali lipat dalam empat tahun ke depan, yakni mencapai sekitar 20 juta pengunjung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, menegaskan bahwa Bali masih menjadi daerah dengan kontribusi devisa terbesar bagi Indonesia. pariwisata bali menyumbang USD 20 miliar setahun (Kemenparekraf, 202). Indonesia terdiri dari lebih 1.340 suku bangsa, masing-masing dengan tradisi, seni, dan adat istiadat yang unik. Keberagaman ini Keunikan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang tertarik mengeksplorasi berbagai aspek budaya, seperti tarian tradisional, alat musik khas, dan festival budaya. Keberagaman budaya Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional seperti UNESCO dan UN Tourism, yang mengakui warisan budaya seperti wayang, keris, batik, dan angklung. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan citra pariwisata budaya Indonesia di tingkat global, tetapi juga menarik lebih banyak wisatawan yang ingin mempelajari serta memahami kearifan lokal.

Salah satu destinasi wisata budaya terkemuka di Asia Tenggara, posisi Indonesia semakin diperkuat melalui promosi internasional, seperti program *Wonderful Indonesia*. Pariwisata berbasis budaya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Sektor ini juga menjadi salah satu pilar utama dalam industri pariwisata nasional, memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menarik 11,68 juta wisatawan

mancanegara, yang berkontribusi terhadap pemasukan devisa sebesar USD 14 miliar (In Choirunnisa Choirunnisa, 2022).

Provinsi Bali lebih mengutamakan pengembangan pariwisata berbasis budaya dibandingkan jenis pariwisata lainnya, seperti pariwisata alam dan bahari. Salah satu sektor yang berperan dalam mendukung perkembangan pariwisata budaya di Bali adalah sektor pertanian. Berdasarkan data Sakernas pada Februari 2023, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Bali mencapai 503.157 orang, atau sekitar 1,24% dari total tenaga kerja pertanian secara nasional pada periode tersebut (DENPASAR, 2024). Sejak awal, Pemerintah Daerah Bali telah merancang dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya sebagai prioritas utama. Budaya memegang peran krusial dalam sektor pariwisata, tidak hanya mencakup seni dan sastra, tetapi juga mencerminkan seluruh aspek kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengembangan pariwisata budaya di Bali berfokus pada pelestarian tradisi, seni, tarian khas, serta kerajinan tangan agar warisan budaya Bali tetap terjaga dan tidak tergerus oleh arus globalisasi serta modernisasi. Dalam penerapannya, pariwisata budaya harus mengacu pada prinsip keberlanjutan, di mana sektor ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian budaya, alam, dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian budaya serta ekosistem Bali tetap terjaga (CAHYANINGTYAS, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan luar negeri, yang diatur melalui keputusan bersama, kecuali dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Namun, ketentuan ini tidak lagi dimasukkan dalam undang-undang yang menggantikannya. Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap rencana kerja sama luar negeri yang

dilakukan oleh daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Ketentuan ini mengacu pada aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan internasional tanpa harus melalui pemerintah pusat (Mukti, *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*, 2020).

Pertumbuhan pariwisata yang cepat juga membawa tantangan terkait pengelolaan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan pelestarian budaya. Upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata menjadi semakin penting. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah paradiplomasi. Menurut Takdir Ali Mukti dalam bukunya *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia*, paradiplomasi atau kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih tergolong sebagai fenomena baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi merujuk pada kemampuan dan tindakan entitas sub-nasional atau pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dengan pihak asing guna memenuhi kepentingan spesifik mereka (Mukti, *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan Indonesia*, 2020).

Melalui paradiplomasi, Pemerintah Provinsi Bali dapat langsung berinteraksi dengan berbagai aktor internasional, seperti organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan badan internasional. Mitra dalam upaya ini adalah *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) atau yang saat ini mengubah nama menjadi *UN Tourism*. *UN Tourism* adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas promosi pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara global (UNWTO, 2023). Melalui paradiplomasi Provinsi Bali berusaha untuk memperkenalkan dan memperkuat identitas budaya Bali di dunia internasional. Ini juga dapat memberikan peluang bagi Bali untuk berperan aktif dalam berbagai acara budaya internasional, festival, dan pameran global. Paradiplomasi memungkinkan Bali untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga internasional, negara atau kota-kota besar di dunia dalam bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi dan mendapat

dukungan untuk mendanai program pelestarian dan melibatkan masyarakat lokal. Bali dapat memanfaatkan relasi internasional untuk mempromosikan budaya Bali serta mendapat dukungan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pengalaman wisata budaya dan dapat lebih kompetitif dalam dunia pariwisata dengan membangun jaringan diplomatik yang kuat dan strategis. (Vero Alfiansyah, 2022)

Kerjasama Provinsi Bali dan lembaga internasional seperti UN *Tourism* sudah ada pasca pandemik Covid-19 yaitu dengan memulihkan pariwisata bali UN *Tourism* mengadakan *workshop* di Bali untuk membangun kapasitas dalam memulai kembali pariwisata internasional serta menyelenggarakan kegiatan Hari Pariwisata Dunia 2022 dengan tema “*Rethinking Tourism*”. UN *Tourism* juga membuat program *Gastronomy Tourism Product Development Project* pada tahun 2023 yang bertujuan menjadikan Ubud sebagai kota pariwisata gastronomi dunia, dengan berbagai kegiatan promosi dan festival kuliner. Program selanjutnya yang telah dilakukan UN *Tourism* dan Provinsi Bali yaitu program *Cleanliness, Health, and Safety (CHSE)*, program ini menerapkan protokol kesehatan sebagai standar operasional untuk memastikan keamanan wisatawan, program ini berlangsung dari awal 2022 hingga 2023. (Tourism, UN Tourism, 2024)

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan UN *Tourism* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata di Bali, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bali dalam sektor pariwisata. Melalui kerja sama ini, Bali bisa mendapatkan dukungan dalam mempromosikan pariwisata budaya Bali, menjaga dan melestarikan situs budaya, seperti pura, monument, dan desa adat yang merupakan daya tarik wisatawan asing. Dengan bantuan UN *Tourism*, Bali bisa meningkatkan visibilitasnya sebagai destinasi wisata budaya yang unik dan menarik. Paradiplomasi tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada perekonomian lokal. Kerjasama internasional membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal, seperti pengusaha kecil

dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata jumlah UMKM berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali hingga 2023 mencapai 442.848 pelaku usaha yang mayoritas usahanya bergerak pada skala mikro mencapai 388.279 unit, kemudian usaha skala kecil mencapai 43.296 unit dan menengah sebanyak 11.273 unit . Selain itu, inisiatif ini juga mendukung pelestarian budaya lokal melalui promosi seni dan tradisi Bali di kancah internasional. Salah satu fokus utama UN *Tourism* adalah pemberdayaan perempuan dan komunitas lokal dalam sektor pariwisata. Ini sangat relevan di Bali, dimana banyak perempuan terlibat dalam industri pariwisata. Program pelatihan dan dukungan bagi perempuan pengusaha di sektor pariwisata membantu mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal sekaligus menjaga warisan budaya. Bali sering menjadi tuan rumah konferensi internasional yang membahas isu-isu terkait pariwisata, termasuk peran budaya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Acara-acara tidak hanya memberikan platform bagi pertukaran ide tetapi juga meningkatkan visibilitas Bali sebagai destinasi yang peduli terhadap keberlanjutan dan pelestarian budaya. Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* saling melengkapi dalam upaya pengembangan pariwisata budaya. Melalui kerjasama internasional dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan, Bali dapat terus menarik wisatawan sambil melestarikan warisan budayanya. Ini menciptakan sinergi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas Pulau Dewata (Anak Agung Mia Intenilia, 2021). Pariwisata budaya Bali tidak hanya memberikan pengalaman yang mendalam tentang kekayaan tradisi, seni, dan keindahan alam, tetapi juga membuka kesempatan bagi turis mancanegara untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Bali. Bali sebagai salah satu destinasi wisata budaya, tetapi juga untuk memahami dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian warisan budaya tersebut. Turis mancanegara dapat mengenal pariwisata budaya Bali dan turut serta menjaga warisan budaya yang ada dengan berpartisipasi dalam acara budaya dan ritual tradisional seperti Upacara Galungan, Kuningan, Nyepi,

dan Tari Kecak. Turis Mancanegara dapat diajak melalui pendekatan edukasi, banyak program yang mengajak wisatawan untuk lebih memahami dan menghargai budaya Bali, serta pelestariannya, Bali memiliki berbagai museum dan pusat budaya seperti Museum Bali, Puri Lukisan, dan Taman Budaya menyediakan informasi tentang sejarah, seni, dan warisan budaya Bali. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, wisatawan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai nilai budaya yang perlu dijaga. Bali juga terkenal dengan keindahan alamnya, yang sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman budaya. Wisatawan mancanegara diajak untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian alam yang menjadi bagian dari budaya Bali, seperti mengunjungi seperti Tegallalang Rice Terrace dan Gunung Agung memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk lebih menghargai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Tradisi seperti subak (system irigasi tradisional Bali) yang telah diakui UNESCO dan UN *Tourism* sebagai warisan budaya dunia, memberi pemahaman bahwa keberlanjutan budaya dan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Penelitian membahas tentang peningkatan hasil paradiplomasi provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya pada tahun 2021-2024. Terkait fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka urgensi dalam penelitian ini adalah paradiplomasi provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya . Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Indonesia bahkan di seluruh dunia memiliki masalah dan tantangan dalam melakukan pengembangan pariwisata budaya seperti tantangan konektivitas dan aksesibilitas, dampak lingkungan dan *overtourism*, komersialisasi budaya, pemberdayaan perempuan dalam pariwisata, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut kerjasama Un *Tourism* dan Provinsi Bali diperlukan untuk memastikan adanya kebijakan terpadu dalam pengelolaan destinasi, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerja sama yang efektif, pariwisata Bali dapat

berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di kancan global, sekaligus tetap melestarikan identitas budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis paradiplomasi provinsi bali dan UN *Tourism* dalam upaya pengembangan pariwisata budaya dengan prinsip keberlanjutan.
2. Untuk mengidentifikasi model pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian budaya dan lingkungan.
3. Untuk mengeksplorasi dampak dari kerjasama Bali dengan UN *Tourism* terhadap pengelolaan pariwisata budaya

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Akademik

- 1) Menyediakan studi kasus konkret tentang peran pemerintah daerah dalam hubungan internasional.
- 2) Menggabungkan perspektif hubungan internasional, pariwisata, budaya, dan studi pembangunan daerah, sehingga memperkaya literatur di berbagai disiplin ilmu.
- 3) Memberikan data empiris yang dapat membantu mengembangkan atau menguji teori-teori tentang paradiplomasi, khususnya yang melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti UN *Tourism*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan pariwisata internasional, yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal.
- 2) Meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

1.5 PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul & Penulis	Pendekatan	Hasil
1	Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama <i>Sister City</i> (Vero Alfiansyah, Eko Priyo Purnomo, Dyah Estu Kurniawati)	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber studi literatur jurnal akademik, mulai dari studi hubungan internasional, hukum, dan pemerintahan. Serta dari situs web resmi, seperti website Kementerian Luar Negeri RI dan pemerintah Denpasar, termasuk media lokal online. Selain itu, Sumber hukum terdiri dari instrumen hukum tertulis, artikel, jurnal, buku tentang disiplin hukum.	Sejak tidak ada kegiatan politik yang terlibat, dengan demikian, kerja sama kota kembar Denpasar tidak memenuhi lapisan ketiga paradiplomasi. penelitian ini juga menyimpulkan kerja sama sister city Denpasar menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala hukum, kelangsungan kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, realokasi pendanaan, dan keterbatasan partisipasi warga. Perlu dicatat bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja sama sister city.
2	<i>Paradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector</i> (Paradiplomasi Bali dan Jeju dalam Sektor Pariwisata) (Rhisma Kurniawati)	Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptis	Kerjasama antar keduanya membuahkan hasil dengan kunjungan Jeju yang meningkat dua kali lipat dari periode sebelumnya. Begitu pula Bali yang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Meskipun begitu ternyata di Korea sendiri promosi Bali masih sangat minim meskipun memiliki potensi yang besar. Sehingga keduanya Kembali memperlambat untuk melakukan

			promosi wisata terutama bagi Jeju yang akan terus meningkatkan promosi wisata Bali di Jeju sana.
3	Paradiplomasi Bali dalam memperkuat jaringan Pariwisata Global (Maulinda Apriliani)	Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis banyak literatur yang sesuai, termasuk jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian yang membahas paradiplomasi Bali dalam memperkuat jaringan pariwisata global.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali berhasil memanfaatkan paradiplomasi untuk meningkatkan konektivitas Internasional serta memperluas jaringan pemasaran pariwisata. Bali juga aktif terlibat dalam mempromosikan budaya setempat sehingga memperkuat posisinya dalam jaringan pariwisata Internasional. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivasi agar daerah lain dapat memanfaatkan paradiplomasi sebagai penunjang sektor ekonomi dan pariwisata.
4	Paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto terhadap UNESCO dalam menetapkan <i>Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto</i> (OCMHS) sebagai Warisan Budaya Dunia (Pamay Yomanda, Khegie)	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara sebagai utama serta menggunakan dokumen sebagai data pendukung	Peneliti menemukan bahwa paradiplomasi yang dilakukan Sawahlunto terhadap UNESCO dilaksanakan menjadi dua kebijakan yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kedua upaya ini berhasil membawa OCMHS diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia

Pada jurnal pertama berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama *Sister City*”** yang disusun oleh Vero Alfiansyah, Eko Priyo Purnomo, Dyah Estu Kurniawati pada tahun 2022. Jurnal penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan empiris kualitatif yang digunakan untuk dua disiplin ilmu yaitu Hubungan Internasional dan Ilmu Hukum mengenai kerja sama daerah. Metodologi ini menggabungkan metodologi penelitian tradisional dari menilai hukum yang tertulis dalam UU dan hokum dalam tindakan dengan pendekatan yang tersedia ke ilmu social. Data penelitian ini jurnal akademik, mulai dari studi hubungan

internasional, hukum, dan pemerintahan. Serta dari situs web resmi, seperti website Kementerian Luar Negeri RI dan pemerintah Denpasar, termasuk media lokal online. Selain itu, Sumber hukum terdiri dari instrumen hukum tertulis, artikel, jurnal, buku tentang disiplin hukum. Jurnal ini menghasilkan bagaimana kota Denpasar melakukan paradiplomasi melalui Sister City untuk mempromosikan kerja sama internasional. Implementasi tiga level paradiplomasi yang terdiri dari isu ekonomi (tingkat 1), budaya, pendidikan, teknologi dan aspek multidimensi lainnya (tingkat 2) dan pertimbangan politik (tingkat 3). Koridor hukum kerja sama daerah untuk penegakan para-diplomatik dieksplorasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen hukum dan hubungan internasional. Para-diplomatik yang dimaksud adalah pemerintah daerah mengevaluasi kerangka hukum dan kendala yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aktor internasional. Pemerintah Denpasar menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan inisiatif Sister City, antara lain hambatan hukum, kontinuitas kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, redistribusi dana dan keterbatasan partisipasi warga. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pelaksanaan kerja sama Sister City yang direncanakan (Kurniawati R. , *Paradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector*, 2021).

Pada jurnal kedua yaitu ***“Paradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector (Paradiplomasi Bali dan Jeju dalam Sektor Pariwisata)”*** yang ditulis oleh Rhisma Kurniawati pada tahun 2021. Jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika kerjasama pariwisata antara kedua provinsi. Kerjasama antar keduanya membuahkan hasil dengan kunjungan Jeju yang meningkat dua kali lipat dari periode sebelumnya. Begitu pula Bali yang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Meskipun begitu ternyata di Korea sendiri promosi Bali masih sangat minim meskipun memiliki potensi yang besar. Sehingga keduanya Kembali memperlambat

untuk melakukan promosi wisata terutama bagi Jeju yang akan terus meningkatkan promosi wisata Bali di Jeju sana. Diharapkan kerjasama ini akan terus terjalin dan tanpa akhir, melihat perkembangan anatar kedua belah pihak sebagai tempat wisata yang bisa dibilang paling terkenal di negara masing – masing, dan menjadi branding tersendiri bagi negara masing – masing. Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan terus membawa perubahan yang lebih baik bagi keduanya. Saling meningkatkan sector pariwisata masing – masing dan juga diharapkan membawa dampak baik bagi perekonomian di daerah tersebut. Karena dengan banyaknya wisatawan membuat perekonomian daerah terangkat secara tidak langsung yang juga ini akan membawa pengaruh bagi perekonomian nasional juga.

Pada jurnal penelitian ketiga yang berjudul **“Paradiplomasi Bali dalam memperkuat jaringan Pariwisata Global”** yang ditulis oleh Maulinda Apriliani pada tahun 2022. Metode penulisan yang digunakan dalam Artikel Ilmiah ini adalah telaah literatur. Penulis mengumpulkan serta menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, juga laporan penelitian yang membahas paradiplomasi Bali dalam memperkuat jaringan pariwisata global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali berhasil memanfaatkan paradiplomasi untuk meningkatkan konektivitas Internasional serta memperluas jaringan pemasaran pariwisata. Bali juga aktif terlibat dalam mempromosikan budaya setempat sehingga memperkuat posisinya dalam jaringan pariwisata Internasional. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivasi agar daerah lain dapat memanfaatkan paradiplomasi sebagai penunjang sektor ekonomi dan pariwisata (Apriliani, Paradiplomasi Bali dalam Memperkuat Jaringan Pariwisata Global, 2022). Pada jurnal penellitian keempat yang berjudul **“Paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto terhadap UNESCO dalam menetapkan *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS)* sebagai Warisan Budaya Dunia”** yang ditulis oleh Pamay Yomanda dan Khegie. Penelitian ini menarik karena mencari tahu diplomasi yang dilakukan oleh actor sub state dalam mencapai kepentingan daerahnya. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan kerangka konseptual

paradiplomacy yang dikemukakan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi. Menurut Sergunin dan Joenniemi terdapat dua metode dalam melaksanakan proses paradiplomasi. Metode pertama yaitu secara tidak langsung dimana daerah akan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri federal; dan yang kedua yaitu secara langsung dimana daerah akan mengembangkan aktivitas paradiplomasi nya sendiri. Pengumpulan data dan analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara sebagai data utama serta menggunakan dokumen sebagai data pendukung. Peneliti menemukan bahwa paradiplomasi yang dilakukan Sawahlunto terhadap UNESCO dilaksanakan melalui dua kebijakan yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan internal yang dilakukan adalah dengan menurunkan aturan legal pemerintah Indonesia terkait kerjasama luar negeri oleh substate actor menjadi peraturan daerah sebagai legal base pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah Sawahlunto. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan kerangka konseptual paradiplomacy yang dikemukakan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi. Menurut Sergunin dan Joenniemi terdapat dua metode dalam melaksanakan proses paradiplomasi. Metode pertama yaitu secara tidak langsung dimana daerah akan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri federal; dan yang kedua yaitu secara langsung dimana daerah akan mengembangkan aktivitas paradiplomasi nya sendiri. Pengumpulan data dan analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara sebagai data utama serta menggunakan dokumen sebagai data pendukung. Peneliti menemukan bahwa paradiplomasi yang dilakukan Sawahlunto terhadap UNESCO dilaksanakan melalui dua kebijakan yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan internal yang dilakukan adalah dengan menurunkan aturan legal pemerintah Indonesia terkait kerjasama luar negeri oleh substate actor menjadi peraturan daerah sebagai legal base pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah Sawahlunto(Khegie, 2020).

Pada penelitian terakhir berjudul **‘Paradiplomasi Pemerintah Bali danUN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya’** yang

ditulis oleh Diana Warmasen. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian dengan judul “Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya ini menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan oleh peneliti banyak berupa kalimat, kata dan frasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang bisa dibaca, tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian sosial. Dokumen dalam sumber data dapat berupa hal yang tertulis maupun dapat berupa visual. Sumber juga bisa didapat dari media massa seperti koran, majalah, program tv, film, internet maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi sebagai sumber dalam menganalisis penelitian social. Perbedaan penelitian dengan keempat penelitian tedahulu diatas yaitu aktor yang gunakan dan cara melakukan paradiplomasinya sendiri, persamaan penelitian ini bias di lihat dari teori dan konsep serta batasan materi yang digunakan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini juga memiliki perbedaan dari jangkauan dan juga pembahasan yang akan diperoleh. Hasil yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan adanya kerjasama internasional ini, Bali dapat mengakses sumber daya global, menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata, dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul, seperti overturism dan ancaman terhadap pelestarian budaya. Dengan menggunakan pendekatan ini, Bali tidak hanya mampu mengembangkan sektor pariwisata, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan,

sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata budaya yang mendunia dan berkelanjutan.

1.6 KERANGKA ANALISIS

1.6.1 Teori Diplomasi Publik

Diplomasi publik sendiri menjadi salah satu penerapan dari soft power. Diplomasi publik memiliki fokus pada pembentukan opini publik, soft power seperti budaya mampu mengenalkan suatu negara kepada publik negara lain dengan baik tanpa melalui paksaan. (Rosyidin, 2020)

Teori Diplomasi Publik dapat dilihat dari sisi publik sebagai objek dan subjeknya. Publik sebagai objek dalam artian publik di negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara. sedangkan publik sebagai subjek dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktifitas diplomasi negara/pemerintah. Sedangkan diplomasi lebih kedalam dalam artian untuk menjelaskan kebijakan kepada publik didalam negeri. Paska Perang Dunia, konsep diplomasi publik lebih banyak digunakan atau sebagai penyamaran atas apa yang disebut dengan propaganda.

Diplomasi publik diciptakan dengan penetapan pada *Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy*, yang mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

“Diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional: perkembangan opini publik di negara lain; interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan si suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan responden asing dan proses dari kultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide” (Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy,

1965). Diplomasi publik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi jalur pertama. Peningkatan peran diplomasi publik dipicu oleh kondisi global yang pada tahun 1990an, ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin. Bergesernya pola-pola hubungan internasional telah meingkatkan ketertarikan badan-badan dan lembaga-lembaga bukan pemerintah untuk terlibat dalam diplomasi dan pembentukan politik luar negeri. Lalu, muncul juga kesaran yang lebih mendalam bahwa negara saling tergantung dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang semakin kental.

Istilah diplomasi publik lainnya menurut Edmund Gullion

bahwasanya:

“Dengan diplomasi publik kita memahami cara-cara pemerintah, kelompok swasta dan individu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain atau pemerintah dengan cara seperti mempunyai pengaruh pada keputusan kebijakan luar negeri mereka. Menurut kamus istilah hubungan internasional yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negei AS tahun 1987. Diplomasi publik mengacu pada program yang disponsori pemerintah dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara-negara lain; Instrumen utamanya adalah publikasi, film, pertukaran budaya, radio dan televise” Sejalan dengan itu, diplomasi publik menurut Tuch (1990) melihat bahwa Diplomasi publik sebagai suatu proses pemerintah berkomunikasi dengan publik asing dalam upaya untuk membawa memahami ide-ide bangsanya dan cita-cita, lembaga dan budaya, serta tujuan nasional dan kebijakan saat ini (Gullion, 1965).

Berdasarkan semua definisi diatas dapat dikatakan bahwa diplomasi publik merupakan komunikasi pemerintah dengan publik dalam hal ini kerjasama Provinsi Bali dan UN *Tourism* yang berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya yaitu

pengembangan pariwisata budaya melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Melalui pendekatan ini, Bali tidak hanya dapat mempromosikan budayanya secara efektif tetapi juga meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata global. Dengan memanfaatkan kerjasama internasional dan keterlibatan masyarakat, Bali dapat terus mengembangkan pariwisatanya secara berkelanjutan sambil menjaga warisan budayanya. Diplomasi publik memungkinkan Bali untuk mempromosikan budaya dan tradisinya secara efektif kepada audiens internasional. Dengan menggunakan platform UN Tourism, Bali dapat menonjolkan keunikan budayanya melalui berbagai inisiatif, seperti festival seni, pertunjukan budaya, dan acara internasional. Ini membantu membangun citra positif Bali sebagai destinasi wisata budaya yang kaya. Teori diplomasi publik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses diplomasi. Di Bali, masyarakat lokal berperan aktif dalam kegiatan pariwisata budaya, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap pariwisata. Keterlibatan ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan dukungan untuk inisiatif pariwisata. Paradiplomasi memungkinkan Bali untuk menjalin kerjasama dengan berbagai aktor internasional, termasuk organisasi seperti UN Tourism. Kerjasama ini menciptakan jaringan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis komunitas. Melalui hubungan ini, Bali dapat mengakses sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik dari destinasi lain di seluruh dunia. Diplomasi publik menyediakan alat pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan. Melalui kampanye komunikasi yang terencana, Bali dapat menyampaikan pesan yang jelas tentang nilai-nilai budaya dan pengalaman unik yang ditawarkan. Ini termasuk penggunaan media sosial, situs web resmi, dan partisipasi

dalam pameran internasional untuk menjangkau audiens yang lebih luas Kerjasama antara Bali dan UN Tourism selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Diplomasi publik membantu memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Ini menciptakan model pariwisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, teori diplomasi publik sangat relevan dalam konteks paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism karena mendukung promosi budaya lokal, keterlibatan masyarakat, kerjasama internasional, strategi pemasaran yang efektif, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Bali dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya global sambil menjaga warisan budayanya.

1.6.2 Konsep Paradiplomasi

Istilah *Paradiplomacy* sendiri pertama kali diperkenalkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuan asal Basque, Panayotis Soidatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* yang kemudian menjadi *paradiplomacy* yang mengacu pada makna *'the foreign policy of non-central governments'* menurut Aldecoa, Keating dan Boyer dan menurut Ivo Duchacek yaitu *micro diplomacy*, dimana paradiplomasi ini adalah sebuah geliat partisipasi pemerintah daerah otonom untuk ikut berkiprah secara internasional. Paradiplomasi sendiri merupakan fenomena yang baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state' atau pemerintah regional yaitu pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Keterlibatan aktor-aktor Internasional dalam melakukan kerja sama Internasional bukan hanya negara saja melainkan *MNCs*, *INGOs*, Individu-Individu, Pemerintah Daerah dan peran serta berbagai aktor lainnya

yang tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Konsep paradiplomasi sendiri adalah sebuah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara dan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aktor sub-nasional dalam diplomasi;
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub-nasional;
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab kepentingan bersama dalam keselarasan,
4. Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuknya.

Secara historis sebelum UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan kerjasama internasional termasuk didalam UU Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 yang dikenal dengan UU Otonomi Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan kerjasama luar negeri tidak wajib bagi daerah (Mukti, 2013). Di era transnasional Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan kerjasama luar negeri dengan berinteraksi secara luas dengan negara lain. Kontribusi dari peran aktor lokal dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, menunjukkan bahwa pandangan terhadap kedaulatan negara berganti secara fundamental. Kewenangan untuk melakukan hubungan Internasional bagi Pemerintah Daerah bersifat tidak wajib, akan tetapi dengan perkembangan globalisasi yang semakin maju, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan ini. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam pengambil keputusan kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, jika tidak berelaborasi terhadap tren yang terjadi dalam dunia Internasional akan menyebabkan ketertinggalan. Daerah yang tidak terampil memanfaatkan peluang kemungkinan ketinggalan dan hanya menjadi konsumen pasif saja dari berbagai kapitalisme global atau sistem perdagangan Internasional.

Pada situasi inilah, Pemda diberikan kewenangan atau kesempatan oleh negara untuk berinteraksi secara langsung saat melaksanakan kerja sama Internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 berlakunya UU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta berkembang secara pesat. Kapabilitas dari Paradiplomasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan upaya Pemerintah Daerah di bidang hubungan luar negeri melalui perkembangan diplomasi multijalur (multitrack diplomacy). Diplomasi multijalur memberikan andil pada berkurangnya berbagai halangan yang dilalui dalam pelaksanaan politik luar negeri hingga dapat menjalin kerjasama Internasional maupun domestik pada saat berjalan diplomasi. Paradiplomasi sendiri adalah instrument dari pembangunan. Dengan demikian dalam membuat kebijakan paradiplomasi harus teliti karena kewenangan ini bersifat kooperatif ataupun menimbulkan konflik dengan Pemerintah Pusat. Kondisi sosial, ekonomi serta politik dapat mempengaruhi akan kebijakan Paradiplomasi yang ada di daerah (Mukti, POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA, 2020). Melalui pendekatan ini, Bali tidak hanya dapat memperkuat identitas budayanya tetapi juga menjalin kerjasama internasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta inovasi dalam sektor pariwisata. Paradiplomasi menjadi alat strategis bagi Bali untuk menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan keunikan budaya dan warisan lokalnya.

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Dalam penelitian dengan judul “Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya ini menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan oleh peneliti banyak berupa kalimat, kata dan frasa.

1.7.2 Unit Analisa

Menurut Mochtar Mas’oed unit analisis merupakan sesuatu yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek penelitian. Unit analisis berupa satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis nya adalah Pemerintah Daerah Bali sebagai aktor subnasional yang melakukan aktivitas paradiplomasi. (umm, 2017)

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang bisa dibaca, tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian sosial. Dokumen dalam sumber data dapat berupa hal yang tertulis

maupun dapat berupa visual. Sumber juga bisa didapat dari media massa seperti koran, majalah, program tv, film, internet maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi sebagai sumber dalam menganalisis penelitian social. (Bryman, 2012)

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, dalam penelitian ini analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian melakukan verifikasi dari data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Huberman, 1992)

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang telah ada kemudian data tersebut akan dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya, data yang cocok akan disederhanakan dengan maksud mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema tertentu. Data yang tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk 27 merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi sebuah uraian singkat. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang telah dikumpul kemudian disusun, sehingga dapat diperoleh kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan langkah dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini terdiri dari teks naratif, tabel, dan bagan yang disusun secara sistematis sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penyimpulan data-data didapatkan sesuai dengan kerangka teori yang dipakai. Kesimpulan yang didapatkan akan dijadikan intisari dari hasil eksperimen dan

pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis termasuk alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis. (Bryman, 2012)

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian

a) Batasan Materi

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian terkait perjanjian spesifik yang mengatur kerja sama Pemerintah Bali dan UN *Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya seperti pelestarian budaya lokal, keterlibatan masyarakat setempat, dan pembukaan lapangan kerja

b) Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian pada tahun 2021-2024 mengingat pada tahun 2021 Bali juga terkena dampak yang cukup signifikan selama pandemic COVID-19 melanda. Menyusul wistawan domestic, pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu Bali secara resmi dibuka untuk wisatawan mancanegara (wisman).

1.8 ARGUMEN POKOK

Melalui paradiplomasi, pemerintah daerah dapat menjalin hubungan dengan negara-negara lain, lembaga internasional, dan organisasi pariwisata seperti UN *Tourism* untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Bali dan menarik wisatawan internasional. Kolaborasi dengan UN *Tourism*, dapat membantu Provinsi Bali memanfaatkan program-program internasional untuk pariwisata berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pengaruh UN *Tourism* terhadap keberlanjutann pariwisata budaya dapat berperan dalam mempromosikan model pariwisata berkelanjutan di Bali, yang mengintegrasikan aspek pelestarian budaya dengan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Bali sering menghadapi tantangan terkait dampak pariwisata massal terhadap budaya lokal. Melalui kerjasama internasional ini, Bali dapat, menerapkan praktik

terbaik dalam pengelolaan pariwisata, dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul, seperti *overtourism* dan ancaman terhadap pelestarian budaya. Dengan menggunakan pendekatan ini, Provinsi Bali tidak hanya mampu mengembangkan sektor pariwisata, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata budaya yang mendunia dan berkelanjutan.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

1.9.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang dilakukan serta teknik-teknik yang digunakan dalam prosesnya. Bab ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari literatur terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi mengenai penelitian dan perbandingan dalam penelitian sekarang, kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis data, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penelitian.

1.9.2 BAB II PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai provinsi bali mengimplementasikan strategi dalam upaya mengembangkan pariwisata budaya melalui paradiplomasi :

- Peran pemerintah bali dalam paradiplomasi
- Strategi diplomasi pariwisata bali
- Keterlibatan bali dalam forum internasional
- Dampak paradiplomasi terhadap pariwisata budaya

1.9.3 BAB III PENGARUH UN *TOURISM* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA

Bab ini penulis akan menguraikan tentang inisiatif dan panduan, UN *Tourism* untuk mendorong integrasi antara sektor pariwisata budaya :

- Peran mempromosikan model pariwisata berkelanjutan
- Peningkatan daya tarik wisatawan internasional
- Strategi untuk meningkatkan pariwisata budaya

1.9.4 BAB IV PARADIPLOMASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISU SOSIAL DAN EKONOMI YANG DIHASILKAN OLEH PARIWISATA BUDAYA

Bab ini akan menjelaskan bagaimana paradiplomasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan internasional, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan ekonomi yang seringkali timbul antara wisatawan dan komunitas local.

- Komersialisasi budaya
- Ketimpangan Ekonomi
- Kerusakan Lingkungan
- Memberikan manfaat bagi masyarakat lokal

1.9.5 BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyatakan kesimpulan serta rekomendasi dari pokok permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai kesimpulan secara garis besar yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI DI INDONESIA

2.1 Perkembangan Praktik Paradiplomasi di Indonesia

Paradiplomasi (*paradiplomacy*) atau kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi atau Kabupaten/Kota secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state* atau pemerintah regional/Pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Paradiplomasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang berhubungan erat dengan perubahan struktural dalam pemerintahan dan kebijakan luar negeri negara. Sejarah paradiplomasi di Indonesia bermula dari masa Orde Baru, ketika hubungan internasional Indonesia sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat. Pada masa itu, pemerintah daerah lebih fokus pada urusan domestik tanpa terlibat langsung dalam diplomasi internasional. Meskipun demikian, beberapa daerah dengan isu-isu tertentu, seperti Aceh dan Papua, sempat terlibat dalam diplomasi terbatas terkait konflik atau bantuan kemanusiaan. Perubahan signifikan terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, ketika Indonesia memasuki era reformasi dan desentralisasi. (Rassanjani, MENGAJI PELUANG DAN TANTANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK, 2022).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengatur urusan mereka, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang mendukung kepentingan daerah masing-masing. Inilah awal mula berkembangnya paradiplomasi di Indonesia, di mana daerah-daerah mulai melihat pentingnya hubungan internasional untuk mendukung pembangunan mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, paradiplomasi di Indonesia berkembang pesat. Pasca

berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, paradiplomasi di Indonesia mulai berkembang. Untuk mendukung kerja sama dalam diplomasi, pemerintah pusat juga memberlakukan regulasi untuk memudahkan paradiplomasi mulai dari UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (DPR RI) hingga Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Lembaga Di Luar Negeri. Praktik paradiplomasi di Indonesia telah berkembang berkat dukungan kebijakan pemerintah pusat yang pro-paradiplomasi. Namun demikian, perkembangan paradiplomasi di Indonesia tidak sebanyak di negara-negara federal pada umumnya, karena dalam melakukan hubungan paradiplomasi, setiap kepala daerah di Indonesia harus mendapatkan surat kuasa yang dibuat oleh pemerintah pusat bernama "*Full Power Letter*." Tanpa adanya surat kuasa ini, kepala daerah tidak memiliki wewenang dalam melakukan hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama internasional. Kerja sama paradiplomasi di Indonesia terdapat dua bentuk yaitu *sister city* dan *sister province*. *Sister city* merupakan kerja sama dengan jangka waktu yang panjang yang dilakukan antara dua kota di dua negara berbeda. (Negeri, 2020)

Kerja sama ini secara resmi dilakukan dan diakui setelah kedua pihak menandatangani perjanjian yang disebut dengan MoU (*Memorandum of Understanding*). Kerja sama *sister city* bersifat independen yang dilatar belakangi untuk membangun hubungan kerja sama dengan negara lain sehingga dapat saling menguntungkan bagi kedua belah negara. Kerja sama *sister city* pada umumnya terjalin antara dua wilayah kota yang memiliki persamaan sejarah, geografis, demografis, dan isu-isu lain yang serupa. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, bentuk kerjasama lain yang dilakukan *sister city* diantaranya adalah industri, investasi, pendidikan, pariwisata, bahkan kebudayaan, yang kemudian bentuk-bentuk kerja sama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Hampir sama dengan kerja sama luar negeri *sister city* yang melibatkan aktor sub-negara dari dua negara yang berbeda, kerja sama *sister province*

merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua provinsi dari dua Negara. Daerah-daerah seperti Bali, Jawa Barat, dan DKI Jakarta mulai aktif menjalankan diplomasi mereka melalui berbagai inisiatif, baik di bidang budaya, pariwisata, maupun kerjasama ekonomi. Provinsi Bali, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan pariwisatanya, mulai gencar mempromosikan kebudayaan Bali ke dunia internasional, menjalin hubungan dengan kota-kota besar di luar negeri melalui program *sister city*, serta mengadakan berbagai acara budaya internasional. Demikian pula dengan Jawa Barat, yang memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain untuk mendukung sektor perdagangan dan investasi. Keberadaan paradiplomasi juga semakin terasa dalam konteks Indonesia sebagai anggota ASEAN. Provinsi-provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Kalimantan dan Sumatra, memanfaatkan kedekatan geografis mereka untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dalam hal ini, paradiplomasi berperan penting dalam mendukung kerjasama regional dan memperkuat integrasi Indonesia dalam komunitas internasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Pasal 1 poin 4 dan 5, disebutkan cakupan aktifitas paradiplomasi Pemerintah RI berlaku dalam 2 (dua) jenis kerja sama, yakni; (1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah di Luar Negeri (KSDPL) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik; dan (2) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa paradiplomasi RI berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; (1) Dalam Kerangka NKRI; (2) Sesuai Tujuan Politik Luar Negeri RI; (3) Berasal dari Negara Yang Memiliki

Hubungan Diplomatik Dengan RI; (4) Tidak Turut Campur (Intervensi) Urusan Dalam Negeri; (5) Wajib berkonsultasi dengan Pusat; (6) Tidak Boleh Membuka Kantor Perwakilan Diplomatik Di Luar Negeri; (7) Pelaksanaannya Aman Secara Politik, Yuridis, Keamanan, dan Teknis. (2018 P. P.)

Dalam konteks share kedaulatan inilah, kebijakan atau politik paradiplomasi suatu negara harus dirumuskan secara seksama sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Politik paradiplomasi yang dimaksud dalam penelitian ini, dimaknai dengan mengambil analogi dari definisi Politik-Hukum atau *legal policy* yang disampaikan oleh Mahfud MD, sehingga politik paradiplomasi ini diartikan sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang paradiplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aturan maupun praktik paradiplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Selain potensi positifnya dalam mendukung pembangunan nasional, kebijakan atau politik paradiplomasi nasional yang kurang tepat dapat membuka peluang bagi terjadinya usaha-usaha pemerintahan regional yang justru mengganggu atau bahkan mengancam kepentingan nasional.

Dengan terlibatnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan negara telah berubah secara fundamental. Sistem Westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada Pemerintah Pusat, harus rela share dengan Pemerintah Daerah dalam aktifitas internasionalnya. Seberapa besar share kedaulatan itu, tentu akan berbeda-beda tiap negara.

2.1.2 Aktor Pelaksana Paradiplomasi di Provinsi Bali

Aktor-aktor pelaksana paradiplomasi berperan penting dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan memperkenalkan kekayaan budaya Bali ke dunia internasional. pengembangan pariwisata budaya di Provinsi Bali melalui paradiplomasi melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah

daerah, masyarakat, sektor swasta, hingga kerjasama internasional dengan organisasi global seperti UN *Tourism*. Kerjasama antar aktor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian budaya Bali yang khas.



Tabel 2.1 Aktor Paradiplomasi 1

Pengembangan pariwisata budaya di Bali, berbagai pihak berperan aktif untuk memperkenalkan, mengelola, dan melestarikan budaya Bali, yang tidak hanya menjadi daya tarik wisata tetapi juga bagian dari identitas budaya Bali itu sendiri. Beberapa aktor utama yang terlibat adalah UN *Tourism*, Kemenparekraf, serta Dinas Pariwisata Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Setiap aktor ini memiliki peran yang penting dan saling melengkapi dalam upaya mempromosikan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Lembaga internasional, UN *Tourism* berperan dalam memberikan panduan dan dukungan global untuk pariwisata yang berkelanjutan dan menghormati nilai-nilai budaya. Melalui program dan inisiatif internasional, UNWTO membantu Bali dalam mempromosikan pariwisata budaya yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga menjaga pelestarian warisan budaya

Bali. Dalam hal ini, *UN Tourism* memberikan kesempatan kepada Bali untuk berpartisipasi dalam forum internasional, seminar, dan kampanye yang mendukung pariwisata berbasis budaya. Hal ini memperkuat posisi Bali di panggung internasional sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman budaya autentik dan mendalam.

Kemenparekraf sebagai lembaga pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata Indonesia secara keseluruhan, termasuk Provinsi Bali. Kemenparekraf terlibat dalam penyusunan kebijakan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung program-program yang mempromosikan Provinsi Bali melalui pemasaran internasional. Selain itu, Kemenparekraf juga memberikan dukungan pendanaan untuk mengembangkan infrastruktur dan acara budaya yang dapat menarik wisatawan. Keberadaan Kemenparekraf memungkinkan Bali mendapatkan perhatian global, baik melalui promosi digital maupun dalam event-event internasional yang dihadiri oleh pelaku industri pariwisata dunia.

Tingkat provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berperan penting dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata budaya. Sebagai bagian dari pemerintah provinsi, Dinas Pariwisata bekerja untuk memastikan bahwa budaya Bali, seperti seni tari, musik gamelan, dan upacara adat, tetap menjadi daya tarik utama wisatawan. Dinas ini juga berperan dalam mengelola destinasi wisata budaya, memastikan bahwa tempat-tempat bersejarah dan situs-situs budaya di Bali terjaga kelestariannya. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali aktif dalam menyelenggarakan dan mendukung berbagai festival budaya yang turut memperkenalkan Bali kepada dunia, sekaligus menjaga tradisi yang telah ada selama berabad-abad.

Pemerintah daerah juga tidak kalah penting dalam pengembangan pariwisata budaya Bali. Pemerintah Kota Denpasar

sebagai ibu kota provinsi memiliki berbagai destinasi wisata budaya yang kaya, seperti Pasar Badung, Museum Bali, dan Pura Jagatnatha, yang menjadi jantung budaya Bali. Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam menjaga dan mempromosikan situs-situs budaya ini, serta mendukung berbagai acara seni dan festival yang menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kota Denpasar juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata budaya, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan budaya Bali. Kabupaten Gianyar, yang dikenal sebagai pusat seni dan budaya Bali, memiliki peran besar dalam mengembangkan pariwisata berbasis seni. Kabupaten ini, terutama daerah Ubud, terkenal dengan galeri seni, pertunjukan tari tradisional, dan kerajinan tangan. Pemerintah Kabupaten Gianyar mendukung pelestarian budaya Bali melalui pengelolaan destinasi seni, festival budaya, dan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk memperkenalkan seni dan budaya Bali kepada wisatawan. Ubud sendiri menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati seni, budaya, dan suasana tradisional Bali yang kental. Kabupaten Tabanan juga berkontribusi besar dalam pengembangan pariwisata budaya, terutama melalui pengelolaan kawasan yang kaya akan warisan budaya, seperti Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui oleh UNESCO. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengembangkan pariwisata yang berfokus pada pelestarian alam dan budaya melalui konsep *agro-tourism* dan *eco-tourism*. Dengan menjaga keberlanjutan sistem pertanian tradisional Subak, Tabanan tidak hanya memperkenalkan pariwisata berbasis alam, tetapi juga memastikan bahwa budaya pertanian Bali tetap hidup dan dapat dinikmati oleh wisatawan.

Kerjasama antara UN *Tourism*, Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota di Bali membentuk ekosistem yang saling mendukung dalam

mengembangkan pariwisata budaya Bali. Melalui kolaborasi ini, Bali mampu mempertahankan kekayaan budayanya, sementara pada saat yang sama, menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian budaya, Bali dapat terus menjadi destinasi wisata budaya yang diakui dan dihormati di seluruh dunia.

2.1.3 Otonomi Daerah dan Paradiplomasi di Provinsi Bali

Seiring dengan kemajuan zaman, fenomena globalisasi yang menuntut keterlibatan daerah dalam kerjasama internasional dalam hubungan internasional, negara tidak lagi menjadi aktor utama, melainkan aktor nonnegara seperti subnegara atau dapat dikenal dengan pemerintah, institusi provinsi dan kota dalam suatu negara. Hal demikian merupakan salah satu implementasi dari paradiplomasi yakni *sister city*. Awal mula paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali adalah melalui kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Denpasar. Denpasar telah melakukan beberapa inisiatif untuk terhubung dengan kota-kota lain di luar negeri melalui kerja sama *sister city*. Awal mula kerja sama *sister city* Denpasar merupakan bentuk inovasi pemerintah daerah. Mantan Walikota Denpasar, Bapak Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, telah berusaha untuk memperluas kerja sama internasional Denpasar dengan membentuk Divisi Kerja sama khusus pada tahun 2012. Denpasar mengharapkan manfaat jangka panjang dari kerja sama ini untuk mendukung *city branding* sebagai "*smart city*". *City branding* dapat memberikan identitas yang membedakan satu kota dengan kota lainnya. Kerja sama internasional bertujuan untuk memperluas jaringan dan belajar dari praktik terbaik kota lain untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasilnya membuat warga Denpasar merasa lebih puas dengan pelayanan publik, oleh karena itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama *sister city* dan *sister province* daerah melakukan pertimbangan potensi melakukan kerjasama untuk kepentingan dan peningkatan di negara dengan berbagai tujuan. Praktik paradiplomasi mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak 16 Juni 1989, paradiplomasi yang terjalin antara Provinsi Bali dan Jeju. Baik Bali maupun Jeju merupakan dua pulau yang menjadi destinasi wisata unggulan di Negara masing-masing. Provinsi Bali dengan julukan Pulau Dewata dan *The Island of Paradise* serta Jeju dengan julukan Samdado (pulau berlimpah 3 hal: bebatuan,, wanita, dan angin) dan *Island of Word Peace* mampu menarik ratusan ribu hingga jutaan wisatawan lokal maupun mancanegara dating setiap tahunnya. Keduanya juga memiliki beberapa kesamaan wisata unggulan diantaranya Desa Penglipuran dan *Seongeup Folk Village* merupakan desa tradisional yang menyajikan gambaran kehidupan masyarakat di masa lalu, tempat ibadah sebagai destinasi wisata religi yaitu Pura Besakih untuk umat Hindu dan Yakcheonsa Temple sebagai pusat studi umat beragama Buddha. Kemudian bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan tradisional, museum Bali dan Jeju bisa dijadikan opsi destinasi yang wajib dikunjungi. Kedua museum ini menyajikan arsitektur tradisional khas masing-masing. Destinasi yang paling utama adalah wisata bahari, sebagai provinsi kepulauan membuat pulau Bali dan pulau Jeju memiliki keindahan laut yang beraneka ragam dan memiliki keunikan masing-masing yang mampu menarik wisatawan lokal maupun asing. (Muhammad Rifki Bukhari Lesmana, 2021-2023)

Pada tahun Agustus 1994 kerja sama *sister city* telah dilakukan oleh Indonesia, salah satunya antara Kota Denpasar dengan Kota Mossel Bay, Cape Town, Afrika Selatan. Kerja sama yang telah terjalin anatar kedua Negara telah dipastikan melalui Kementerian Luar Negeri. Keduanya resmi menjallin hubungan diplomatic sejak 12 Agustus 1994. Deklarasi bersama kemitraan

strategis tahun 2008 memperkuat hubungan bilateral, dengan menetapkan Afrika Selatan sebagai satu-satunya mitra Indonesia di Afrika. Hubungan bilateral ini semakin sempurna dengan adanya inisiatif *sister city* Denpasar dan Mossel Bay. Kota Denpasar telah menjalin hubungan paradiplomasi sejak tahun 1994. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sejak tahun 1960 hingga saat ini. Kota ini merupakan tempat kantor Gubernur Bali dan seluruh perkantoran, mulai dari swasta hingga kantor penting Pemerintahan. Selain itu Kota Denpasar juga menjadi pusat pengembangan ekonomi, bisnis dan budaya Bali. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat menarik yang berada di Kota ini sehingga ditunjuk untuk menjadi destinasi wisata. Disisi lain Kota Mossel Bay merupakan kota pelabuhan yang dikelilingi pantai dan memiliki banyak wisata antara lain laut, pendakian dan lainnya. Dalam kondisi geografis, Kota Mossel Bay terletak di semenanjung Cape Saint Blaize yang menghadap teluk kecil di Samudra Hindia yang disebut dengan Mossel Bay. (Tegar Citra Samudera, 2024)

Perspektif hukum ketatanegaraan, paradiplomasi merupakan konsekuensi dari otonomi pemerintah daerah dan desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah sering disandingkan dengan desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan negara, walaupun secara akademik keduanya mempunyai istilah yang bisa dibedakan. Sehingga pembahasan tentang otonomi daerah tidak mungkin dilakukan tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Konsep otonomi daerah ramai dibicarakan dalam tatanan pemerintahan di era reformasi, sebagai jawaban atas permintaan masyarakat yang mengharapkan adanya situasi baru dalam pengelolaan pemerintahan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Menurut asal-usul kebahasaan,

istilah otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti perintah. Otonomi mempunyai makna memerintah sendiri. Konsep administrasi publik daerah otonom sering disebut sebagai *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local self government*. (Nuradhawati, 2021)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tujuan memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih efektif dan akuntabel. Dengan adanya aturan ini, setiap tingkat pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih terstruktur dalam mengelola daerahnya. Pada ketentuan ini, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utama: urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut, seperti pertahanan, keamanan, moneter, politik luar negeri, dan agama, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, urusan konkuren dikelola bersama oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, urusan pemerintahan umum berkaitan dengan koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal stabilitas nasional dan ketertiban masyarakat. UU ini juga memperkuat peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selain menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah provinsi, gubernur juga memiliki wewenang untuk mengawasi serta membina pemerintahan kabupaten/kota agar kebijakan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, terdapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Aspek

keuangan daerah juga menjadi fokus utama dalam undang-undang ini. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi, serta dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (PERATURAN, JDIH BPK DATABASE PERATURAN, 2014)

Isu tentang otonomi khusus di Bali sudah lama muncul, kira-kira tahun 2004 dan sudah masuk ke daftar usulan Prolegnas tahun 2009 - 2014. Awalnya DPRD/legislatif yang punya inisiatif namun kemudian diusulkan untuk diteruskan oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Latar belakang dari usulan otonomi khusus di Bali adalah Pulau Bali yang kecil dalam sehari saja semua ibukota kabupaten sudah bisa dikunjungi, sehingga dirasa akan lebih baik apabila mempunyai manajemen yang mandiri untuk mengelola sendiri pulaunya dan di harapkan adanya hubungan bupati dengan Gubernur lebih sinergis. Bali merupakan satu pulau yang kecil namun manajemen destinasi wisatanya tidak satu tapi multi manajemen. Kabupaten dan kota di Provinsi Bali memiliki standar operasional destinasi wisata yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, sebagai contoh Kabupaten Badung dikenal sebagai pusat pariwisata modern sehingga pengelolaannya lebih berfokus pada pengembangan fasilitas wisata kelas internasional. Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud, memiliki daya tarik sebagai pusat seni dan budaya di Provinsi Bali dengan destinasi seperti tegallalang, Goa Gajah, serta berbagai galeri seni dan museum. Pengelolaan wisata di Gianyar lebih menonjolkan ekowisata serta kekayaan seni budaya, dengan banyaknya pertunjukkan tari tradisional, workshop seni, serta desa wisata. Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan wisata

baharinya. Pengelolaan wisata di daerah ini lebih berfokus pada ekowisata dan kelestarian lingkungan. Manajemen destinasi wisata di Provinsi Bali sangat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing kabupaten/kota serta peran pemerintah provinsi. Hal ini terjadi karena adanya desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur pengelolaan wisata sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya.

Pengelolaan pariwisata Bali di era reformasi dengan adanya otonomi daerah seakan-akan tak terkendali atau kebablasan. Sejak otonomi daerah berlangsung, adanya kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri menjadikan Kabupaten melakukan pengelolaan sendiri dengan tidak memperhatikan atau mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh provinsi. Provinsi Bali dikelola dengan manajemen destinasi pariwisata yang warna-warni yakni 9 manajemen destinasi di kabupaten dan kota plus satu di provinsi. Dinamika masyarakat Bali, sebenarnya tidak ada gejolak atau konflik yang berarti dalam masyarakat yang menjadi latar belakang permintaan otonomi khusus di Bali, seperti biasanya yang terjadi di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bahwa pemberian otonomi khusus untuk meredam konflik yang ada di daerah tersebut. Oleh karena masih dalam rencana yang belum konkret, hingga saat ini belum ada konsep yang dibicarakan tentang bentuk otonomi khusus di Bali. . Provinsi Bali menjadikan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan otonomi yang diterapkan pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan.

Pemerintah Provinsi Bali segera menyiapkan peraturan daerah setelah RUU Provinsi Bali disahkan DPR RI pada tanggal 4 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023. Undang-undang ini memberikan payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mengimplementasikan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Beberapa poin penting dalam UU tersebut ialah :

- Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan ibukota di Kota Denpasar
- Di wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- Pemberian otonomi daerah memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis
- UU ini memberikan kewenangan bagi Bali untuk memungut biaya dari wisatawan asing, yang menjadi sumber pendapatan baru
- Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali menjadi amanah untuk dijalankan dalam perencanaan pembangunan Bali yang berkelanjutan

Provinsi Bali memiliki undang-undang sendiri melalui perjuangan segenap masyarakat yang diajukan ke pemerintah pusat. Sejak Juli 2023, lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, setelah selama puluhan tahun berada di bawah satu payung hukum dengan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Undang-undang yang lahir pada sisa masa jabatan Gubernur Wayan Koster itu memberi kewenangan Bali untuk mengambil pungutan wisatawan asing. Alhasil, mulai tahun ini

Bali memiliki sumber pendapatan baru. Meskipun undang-undang ini sudah lahir sejak 2023, implementasi Pasal 8 yang mengatur pungutan wisatawan asing, baru dimulai 14 Februari 2024. Artinya, tepat pada hari jadi Provinsi Bali nanti, yaitu 14 Agustus 2024, pungutan ini genap berusia 6 bulan berjalan. Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali mencatat regulasi tersebut sebagai capaian besar. Amanat ini bukan hal yang mudah meski saat ini sudah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp182 miliar. Pendapatan yang dihimpun hanya dalam 1 semester tersebut cukup bermakna bagi APBB Bali. Pos pendapatan pada APBD Provinsi Bali 2024 sebesar Rp6,35 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp4,07 triliun, transfer Pemerintah Pusat Rp2,27 triliun, dan pendapatan sah daerah Rp5 miliar. Manfaat undang-undang ini paling terasa di sektor pariwisata, sebab di regulasi ini jelas tertuang kekhasan Bali yang dapat mengatur kewajiban wisatawan mancanegara membayar retribusi untuk memajukan dan memperkuat kebudayaan dan lingkungan. Mulanya, setelah Undang-Undang Provinsi Bali lahir, diturunkan Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 yang mengulas mekanisme pemungutan. Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pelayun menyebut sejak undang-undang provinsi lahir, mereka tak pernah berkhayal soal nominal karena hanya fokus menyosialisasikan regulasi ini (Bali, 2023)..

2.2 Kontribusi Paradiplomasi dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Bali

Pengembangan pariwisata budaya menawarkan berbagai manfaat yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, pelestarian warisan budaya, dan peningkatan pemahaman antarbudaya. Namun, di sisi lain, pengembangan ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dihadapi agar tidak merusak nilai-nilai budaya yang ada. Pariwisata budaya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi lokal melalui sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai bisnis lainnya. Wisatawan

yang datang untuk mengunjungi situs budaya atau acara tradisional memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah tersebut.

Pengembangan pariwisata budaya sering kali berkontribusi pada pelestarian warisan budaya, baik material maupun immaterial. Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata dapat digunakan untuk merawat situs-situs sejarah, bangunan bersejarah, dan melaksanakan festival budaya yang dapat memperkenalkan tradisi kepada masyarakat luas. Pariwisata budaya memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam industri pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengrajin, atau penyelenggara acara budaya. Ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberdayakan mereka untuk melestarikan kebudayaan mereka. Pariwisata budaya dapat menjadi jembatan bagi pertukaran budaya antara wisatawan dan komunitas lokal. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi antarbudaya, mengurangi prasangka dan stereotip antar masyarakat yang berbeda. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata budaya adalah risiko komodifikasi, di mana kebudayaan diperlakukan hanya sebagai produk yang dijual kepada wisatawan. Hal ini bisa mengurangi makna dan nilai autentik dari kebudayaan itu sendiri, karena budaya dapat terdistorsi atau dimodifikasi hanya untuk memenuhi selera pasar wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan ke situs budaya dapat menyebabkan kerusakan fisik pada situs-situs bersejarah atau lingkungan sekitar. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan budaya yang ada. Dalam beberapa kasus, jumlah wisatawan yang berlebihan dapat menyebabkan "*overtourism*," yang berdampak buruk pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Kepadatan wisatawan dapat menyebabkan gangguan pada rutinitas sehari-hari, meningkatkan biaya hidup, dan bahkan menurunkan kualitas hidup penduduk setempat. Sektor pariwisata yang berfokus pada budaya dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Ketika industri pariwisata tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa mengakibatkan kerugian besar jika terjadi penurunan jumlah

wisatawan atau krisis ekonomi global. Meskipun pariwisata budaya dapat memperkenalkan budaya kepada dunia luar, kehadiran wisatawan asing juga dapat mengubah pola hidup dan tradisi lokal. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya asli jika masyarakat lokal lebih tertarik meniru kebiasaan atau budaya wisatawan, mengabaikan tradisi mereka sendiri. Pengembangan pariwisata budaya memiliki banyak manfaat yang bisa mendukung ekonomi lokal dan pelestarian kebudayaan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, tantangan-tantangan tersebut perlu dikelola dengan bijaksana. Pendekatan yang berkelanjutan dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata sangat diperlukan agar manfaat dari pariwisata budaya dapat dinikmati tanpa merusak atau mengurangi nilai budaya yang ada (Hermawan, Sinergi Lokal Sinergi Lokal untuk Dampak Global: Paradiplomasi Bali dalam Pariwisata Berkelanjutan sebagai Diplomasi Publik (2020-2023), 2020-2023).

2.3 Hubungan UN Tourism –Indonesia

2.3.1 Bergabungnya Indonesia dengan UN Tourism

Secara historis, Indonesia sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam program-program dan pertemuan yang diselenggarakan oleh UN Tourism. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari total 160 negara anggota UN Tourism, dan sudah menjadi anggota dari UN Tourism . Indonesia dan UN Tourism dikatakan memiliki hubungan yang cukup dekat terlebih lagi mengingat bahwa pariwisata menjadi salah satu andalan Indonesia sebagai sector penghasil devisa yang cukup besar. Bergabungnya Indonesia di organisasi pariwisata kancah internasional tersebut, merupakan sebuah tanda dimana Indonesia secara langsung juga akan terlibat dalam misi pembangunan pariwisata dunia. Adapun Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi titik focus Indonesia berperan aktif dalam program-program UN Tourism.

Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi terpilih menjadi tuan rumah untuk program tahunan UN Tourism, *World Tourism*

Day. Keputusan yang disahkan melalui Sidang Majelis Umum ke-24 UN *Tourism* pada 30 November – 3 Desember 2021 di Madrid. Dengan mengambil tema “*Rethinking Tourism*”, yang dimana memiliki makna sebuah harapan untuk tahun 2022 menjadi saksi pembangunan kembali pariwisata pasca pandemic COVID-19. Meskipun pariwisata telah menjadi salah satu sector yang paling terpukul oleh pandemic, visibilitas dan relevansi sector ini juga tumbuh kuat pada tingkat penerimaan politik, kebijakan, media, dan social lintas sektoral selama periode ini. *World Tourism Day* atau hari Pariwisata Dunia sendiri adalah sebuah perayaan yang diselenggarakan setiap tahun oleh UN *Tourism* setiap tanggal 27 September sejak tahun 1980. Adapun penentuan *World Tourism Day* tersebut terjadi pada Sidang Majelis Umum UN *Tourism* ke-3 di Torremolinos, Spanyol pada September 1979. Tanggal 27 September dipilih dengan maksud untuk menandai ulang tahun adopsi Statuta Organisasi pada tahun 1970 di Sidang Majelis Umum IUOTO, Mexico City, yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan UN *Tourism* pada lima tahun kemudian (Rifqi, 2023).

Indonesia juga beberapa kali memenangkan penghargaan yang diberikan oleh UN *Tourism*, dengan tajuk UN *Tourism Awards*. Pada 2016, Indonesia disebut sebagai satu-satunya Negara yang berhasil memboyong 3 nominasi sekaligus pada penyelenggaraan 12th UN *Tourism Awards* 2016. Dalam ajang tersebut Indonesia bersaing dengan 109 proyek pariwisata dari 13 negara terpilih lainnya. Adapun ketiga nominasi yang dimenangkan oleh Indonesia tersebut yakni Banyuwangi yang menjadi juara pertama kategori *Innovation in Public Policy and Governance*, Garuda Indonesia dan Coca Cila Amatil “*Bali Beach Clean Up*” di posisi *first runner up* pada kategori *Innovation in Enterprises*, Yayasan Karang Lestari – *Coral Reef Reborn Pemuteran*, Bali yang juga menjadi *first runner up* Pada kategori

Innovation in Non-Governmental Organizations. Sejak tahun 2003, Penghargaan UN *Tourism Awards* telah banyak diberikan untuk mengapresiasi inisiatif dan proyek pariwisata yang menunjukkan kontribusi positif terhadap pembangunan pariwisata dan peningkatan hidup masyarakat setempat. Hingga saat ini, UN *Tourism* telah mengakui kontribusi para akademisi, pemimpin yang menginspirasi, serta lebih dari 80 inisiatif dari sector public dan swasta serta NGO. Prestasi mereka menjadi inspirasi bagi pengembangan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan di tingkat local, nasional, regional, dan internasional. Kontribusi penerima penghargaan sejalan dengan Kode Etik Pariwisata Global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Dalam meningkatkan kualitas pariwisata di kawasan, Indonesia juga berpartisipasi dalam program kerjasama regional yang ditawarkan oleh UN *Tourism*. Salah satunya adalah 12th IFTM-UNWTO *Training Programme on Solutions for Sustainable Tourism Development and Destination Branding in Times of Crisis and Beyond* pada tanggal 6-9 Desember 2021 yang diadakan secara virtual/online. Program ini merupakan inisiatif bersama antara *Macao Institute for Tourism Studies* (IFTM) dan UN *Tourism*, yang bertujuan untuk membekali para profesional pariwisata dari kawasan ASEAN dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan praktik pariwisata berkelanjutan, membangun destinasi yang tangguh, dan secara efektif mengelola krisis yang dapat berdampak pada industry pariwisata pasca krisis COVID-19, dilaksanakan melalui program pelatihan online yang terdiri dari tiga webinar berdasarkan tema “*Solutions for Sustainable Tourism Development and Destination Branding in Times of Crisis and Beyond*.” Selanjutnya dalam beberapa kesempatan Indonesia juga aktif di berbagai forum pariwisata dunia yang diadakan oleh UN *Tourism*, salah satunya pada ajang 5th *United Nations World Tourism Organizations*

(UNWTO) *World Forum on Gastronomy Tourism 2019*, Indonesia menggunakan kesempatannya sebagai salah satu Negara pembicara untuk melakukan promosi kuliner local khas nusantara sekaligus memperkenalkan Ubud sebagai kota pariwisata gastronomi berstandar global adapun kedua hal tersebut oleh Vita Datay selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan wisata kuliner dan belanja Kementerian Pariwisata (KEMENPAREKRAF, 2024).

UN *Tourism* dan Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif bersama dalam upaya mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Program *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency with Adaption and Mitigation Measure* (STREAM) di Pangandaran adalah salah satu program yang diinisiasi oleh UN *Tourism* dalam upaya mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia pasca tsunami Jawa Barat 2006. Program yang berlangsung dari 2011 hingga 2014 ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energy di sector pariwisata. Program STREAM ini juga merupakan bagian dari *International Climate Initiative* yang didukung oleh Kementerian Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir. Selama pelaksanaannya, program ini telah menghasilkan beberapa keberhasilan seperti pengurangan emisi karbon dan penghematan energy di hotel dan restoran, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola pariwisata berkelanjutan. (Kemenparekraf/Baparekraf, 2024)

2.3.3 Kolaborasi Provinsi Bali dengan UN *Tourism*

Pada tahun 2005, Bali menjadi tuan rumah bagi UNWTO *Asia Pacific Conference*, yang menggarisbawahi komitmen Bali dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Konferensi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam memajukan

pariwisata yang berbasis pada pelestarian budaya dan lingkungan. Dalam konferensi ini, Bali diperkenalkan sebagai contoh destinasi pariwisata yang dapat mengintegrasikan aspek kebudayaan, ekologi, dan ekonomi dalam pengelolaannya. Setelah itu Bali terus bekerja sama dengan UN Tourism untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata berbasis budaya dan keberlanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada forum internasional, tetapi juga mencakup berbagai program dan proyek yang berfokus pada pelestarian budaya Bali serta pemanfaatan pariwisata sebagai alat pemberdayaan masyarakat local.

Fokus utama kerjasama Provinsi Bali dengan UN *Tourism* adalah promosi pariwisata budaya. Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengelola jumlah wisatawan yang terus meningkat tanpa merusak budaya dan lingkungan local. Melalui kerjasama dengan UN *Tourism* , Provinsi Bali mengembangkan kebijakan pariwisata yang memprioritaskan keberlanjutan seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan pengurangan dampak lingkungan dari pembangunan pariwisata. Provinsi Bali juga berpartisipasi dalam *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), yang bekerja sama dengan UN *Tourism* untuk menetapkan standar global dalam pariwisata berkelanjutan. Program ini membantu Provinsi Bali dalam merancang kebijakan yang mendukung konservasi alam dan pelestarian budaya, sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Melalui kerjasama dengan UN *Tourism* , Provinsi Bali mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan seminar internasional yang berfokus pada pengelolaan pariwisata budaya dan pembangunan kapasitas dalam seektor pariwisata. Program pelatihan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sector swasta, dan masyarakat local, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya melestarikan budaya Bali sambil memaksimalkan potensi ekonomi

dari sector pariwisata, Bali telah berticipasi dalam berbagai workshop internasional yang diadakan oleh *UN Tourism* yang membahas tentang keberlanjutan, pelestarian wisata budaya, dan pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya. Melalui program ini Bali dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industry pariwisata, serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata yang ramah terhadap budaya dan lingkungan (Council, 2020).

UN Tourism sangat mendukung pengembangan wisata berbasis komunitas sebagai strategi untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat langsung bagi mereka. Bali mengadopsi model ini dengan mengembangkan wisata desa adat yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian budaya mereka. *UN Tourism* membantu Bali dengan memberikan panduan tentang cara mengelola wisata berbasis komunitas yang mendukung kelestarian budaya, lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu contoh konkrit dari kerja sama ini adalah pengembangan Desa Wisata di beberapa daerah di Bali, di mana wisatawan dapat tinggal bersama keluarga lokal, belajar tentang kehidupan sehari-hari, tradisi, dan budaya Bali, serta berpartisipasi dalam aktivitas budaya seperti upacara adat atau seni tradisional. Ini merupakan bentuk wisata yang lebih mendalam dan menghargai budaya lokal, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Kerja sama Bali dengan *UN Tourism* juga melibatkan promosi budaya Bali di tingkat internasional melalui berbagai acara global. Bali sering menjadi tuan rumah bagi konferensi dan pertemuan yang diorganisir oleh *UN Tourism* untuk membahas isu-isu pariwisata global, termasuk pelestarian budaya dan keberlanjutan. Sebagai contoh, Bali menjadi tempat penyelenggaraan *UN Tourism Global Conference on Sustainable Tourism* pada tahun 2018, yang

mengangkat pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam acara semacam ini, Bali memperkenalkan dirinya sebagai destinasi yang tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga sebagai pionir dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab. Selain itu, Bali berpartisipasi dalam *UN Tourism Silk Road Program*, yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara destinasi wisata budaya di seluruh dunia dan mempromosikan Bali sebagai bagian dari jaringan pariwisata internasional. *UN Tourism* juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan tentang pariwisata yang bertanggung jawab .

Provinsi Bali, dalam hal ini, telah melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai program pendidikan pariwisata untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya pelestarian budaya dan cara-cara mengelola pariwisata yang menguntungkan secara ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pariwisata, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya Bali melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan merawat aset budaya mereka. Melalui kolaborasi yang erat dengan UNWTO, Provinsi Bali telah berhasil mengembangkan pariwisata yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan pelestarian budaya. Kerja sama ini menjadi contoh yang baik bagi destinasi pariwisata lainnya dalam mengintegrasikan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi dalam pengelolaan pariwisata secara holistik dan berkelanjutan.



Gambar 2.1 Asia Pacific Conference 1

Sumber: (AgeingAsiaConf2024, 2024)

Konferensi Asia Pasifik yang diadakan di Bali merujuk pada pertemuan atau konferensi internasional yang diselenggarakan di Bali, yang membahas isu-isu penting dalam sektor pariwisata dan pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Salah satu konferensi yang cukup terkenal adalah UNWTO (United Nations World Tourism Organization) *Asia Pacific Conference* yang diadakan di Bali pada tahun 2005. Konferensi ini memiliki fokus utama pada isu-isu terkait dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2005 dan 2023, Bali menjadi tuan rumah untuk Konferensi Asia Pasifik UNWTO, yang bertujuan untuk membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pariwisata di kawasan tersebut. Konferensi ini menjadi platform penting untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan terbaik dalam pengelolaan destinasi wisata, serta meningkatkan kolaborasi antara negara-negara anggota dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. topik yang dibahas dalam konferensi ini antara lain Menyusun kebijakan yang memastikan bahwa sektor pariwisata memberikan manfaat bagi ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan dan budaya, pariwisata dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat local dan menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya serta ekosistem. Selain itu, konferensi ini juga memberikan kesempatan bagi Bali untuk menampilkan komitmennya dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan dan berbasis budaya, serta membangun citra Bali sebagai destinasi pariwisata global yang memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Bali menjadi tempat yang

sangat strategis untuk menyelenggarakan konferensi internasional ini karena Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang kaya akan budaya dan alam, serta memiliki pengalaman dalam mengelola sektor pariwisata yang tumbuh pesat. Konferensi ini memberikan platform untuk berdiskusi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bali dan destinasi lainnya dalam mengelola pariwisata massal, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (AgeingAsiaConf2024, 2024).

Melalui penyelenggaraan konferensi ini, Bali tidak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata internasional, tetapi juga mendapatkan pengakuan global sebagai model untuk pengelolaan pariwisata berbasis budaya dan keberlanjutan.

2.3.4 Peran UN Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

Perkembangan pariwisata global, *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), yang kini dikenal sebagai *UN Tourism*, muncul sebagai pilar penting dalam pengembangan pariwisata budaya. Dengan visi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, *UN Tourism* berkomitmen untuk menjaga keberagaman budaya di seluruh dunia, serta memastikan bahwa manfaat dari sektor ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh *UN Tourism* adalah promosi pariwisata berkelanjutan. Melalui program-program inovatif seperti *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran* (STREAM), *UN Tourism* telah berhasil mengembangkan destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga ramah lingkungan. Di Indonesia, misalnya, proyek ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur pariwisata di Pangandaran tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Dengan pendekatan ini, *UN Tourism* membantu menciptakan ekosistem pariwisata yang seimbang antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kerjasama

internasional juga menjadi fokus utama UN *Tourism*. Dalam upaya revitalisasi kawasan pariwisata Pangandaran pasca bencana alam, UN *Tourism* menjalin kemitraan dengan berbagai negara untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Konferensi internasional yang diadakan oleh organisasi ini menjadi platform penting untuk mendiskusikan isu-isu krusial, termasuk pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata. Dengan cara ini, UN *Tourism* tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendorong keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Salah satu inisiatif menarik dari UN *Tourism* adalah program "Desa Wisata Terbaik," yang bertujuan untuk mengakui dan mendukung desa-desa dengan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam. Melalui program ini, desa-desa tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memperkuat jaringan kolaborasi antar desa wisata. Inisiatif ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya lokal tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk berkontribusi dalam industri pariwisata. Dampak sosial-ekonomi dari upaya UN *Tourism* sangat signifikan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan pariwisata, organisasi ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Program-program yang dijalankan dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya segelintir individu atau kelompok tertentu. Dalam keseluruhan narasi ini, UN *Tourism* berperan sebagai katalisator dalam pengembangan pariwisata budaya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Melalui kerjasama internasional, promosi pariwisata berkelanjutan, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat lokal, organisasi ini menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, UN *Tourism* tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga melestarikan warisan budaya dan

lingkungan global untuk generasi mendatang. Selain itu, UN *Tourism* juga berperan dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dengan mengakui beberapa lokasi sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Dengan cara ini, UN *Tourism* mendorong pengembangan pariwisata yang menghargai warisan budaya dan lingkungan. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sektor pariwisata, termasuk isu keamanan dan bencana alam, sekaligus memastikan bahwa keindahan alam dan budaya Indonesia tetap terjaga. Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi fokus utama dalam upaya UN *Tourism*. Dalam konteks ini, organisasi ini memberikan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai agen perubahan dalam transformasi pariwisata. Melalui panduan dan pelatihan yang disusun bersama mitra internasional, UNWTO membantu masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan konsep pariwisata serta memanfaatkan potensi unik daerah mereka (BALI, 2024).

2.4 Potensi Pariwisata Budaya Provinsi Bali

Pariwisata di Bali mulai berkembang sejak awal abad ke-20, meskipun Bali sudah dikenal sebagai destinasi bagi pedagang dan pelancong sejak zaman kerajaan Bali. Sejak masa kolonial Belanda, Bali sudah mulai menarik perhatian wisatawan asing, meskipun pada waktu itu jumlahnya terbatas dan lebih terkait dengan perjalanan seni dan budaya. Pada tahun 1930-an, Bali mulai dikenal oleh kalangan seniman dan intelektual Barat, seperti seniman Eropa yang datang untuk mengagumi seni, arsitektur, dan kehidupan lokal yang penuh warna. Seiring dengan perkembangan transportasi udara pasca Perang Dunia II, Bali mulai menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, Bali mulai menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Perkembangan pariwisata Bali mulai mencatatkan angka kunjungan yang signifikan, dengan sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama

perekonomian Bali. Bali memiliki posisi yang unik dan sangat penting dalam pengembangan pariwisata budaya global. Hal ini disebabkan oleh keunikan budaya Bali yang memadukan agama Hindu-Bali, seni tradisional, adat istiadat, serta cara hidup masyarakat yang masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya lokal. Bali dikenal dengan upacara keagamaan seperti Galungan dan Kuningan, serta berbagai ritual dan tradisi yang berlangsung sepanjang tahun. (FIRDAUS, 2022)

Pariwisata budaya di Bali tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tetapi juga budaya yang hidup dalam keseharian masyarakatnya. Tarian-tarian tradisional, seperti Tari Kecak dan Tari Barong, serta seni ukir dan lukisan Bali, menjadi bagian integral dari daya tarik Bali. Selain itu, banyak wisatawan yang datang ke Bali untuk menyaksikan langsung upacara keagamaan, seperti Nyepi, yang merupakan perayaan Tahun Baru Saka di Bali. Bali juga menjadi tuan rumah bagi berbagai festival budaya internasional, yang menempatkan pulau ini sebagai pusat kebudayaan di Asia Tenggara. Kegiatan seperti Festival Seni Bali (*Bali Arts Festival*) yang digelar setiap tahun mengundang ribuan wisatawan untuk menyaksikan pertunjukan seni tradisional Bali, pameran seni, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Meskipun pariwisata telah membawa banyak keuntungan ekonomi bagi Bali, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pelestarian budaya. Dapat dilihat bahwa pariwisata massal berpotensi merusak nilai-nilai budaya asli dan memperkenalkan praktik-praktik komersialisasi budaya yang bisa mengurangi otentisitasnya. Oleh karena itu, sejak beberapa dekade terakhir, pemerintah Bali dan berbagai organisasi terkait mulai fokus pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Bali, dalam hal ini, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi budaya dalam setiap kebijakan pariwisata. Salah satu langkah nyata adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, menjaga agar warisan budaya tetap hidup dan dihargai, sembari memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari sektor pariwisata. Dengan sejarah yang kaya, Bali memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks pariwisata budaya

global. Pulau ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keberhasilan dalam memadukan pariwisata dengan pelestarian budaya yang menjadi ciri khasnya.

Destinasi wisata Indonesia yang sudah sukses di pasara internasional salah satunya wisata Bali. . Bali adalah salah satu tujuan wisata yang dikenal oleh kalangan masyarakat internasional. Keindahan pulau Bali memancarkan pesona yang memikat. Ada banyak atraksi menarik untuk dinikmati di Bali. Keindahan alamnya hingga budaya Bali yang sangat mempesona para wisatawan. Perkembangan wisata di Bali juga sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya masyarakat Bali. Adat istiadat, seni dan budaya merupakan potensi dasar yang utama, artinya masyarakat sangat ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pariwisata dan budaya. Dasar penentuan pengembangan pariwisata di Bali adalah “Peraturan Daerah tentang Pariwisata Bali No 2 Provinsi Bali” tahun 2012. Peraturan ini menggantikan peraturan pariwisata budaya Provinsi Bali No 3 tahun 1991 yang dinilai tidak sejalan dengan keputusan pariwisata nasional yang diatur dala Undang-Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009.

Daya tarik keanekaragaman budaya yang semakin berkembang menjadi salah satu keunggulan wisata budaya di Bali. Berkembangnya wisata budaya di Bali pasti akan meningkatkan manfaat dari seluruh tahapan kehidupan di Bali, yaitu dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadi tujuan wisata dan daya tarik khusus bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Berkembangnya wisata budaya yang nantinya juga akan memberikan kontribusi daya tarik pulau Bali bagi wisatawan mancanegara. Pariwisata ada dan berkembang karena adanya perbedaan, keunikan, flora, fauna maupun dalam bentuk budaya sebagai hasil kreativitas, prakarsa, citra rasa dan budaya manusia. Tanpa adanya perbedaan itu, tidak akan ada pariwisata, tidak ada orang yang berpergian untuk berwisata. Oleh karena itu, perlindungan alam dan budaya serta pemeliharaan keanekaragaman merupakan fungsi utama pariwisata. Alam dan budaya dengan segala keunikan dan perbedaannya merupakan nilai

wisata yang harus dilestarikan. Bali sejak dulu sudah dijuluki sebagai pulau Dewata karena Bali sangat kental sekali dengan ciri khasnya yang dimana dipengaruhi dengan mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Hal ini membuat pariwisata Bali tidak hanya menjadi andalan pemerintah Provinsi Bali akan tetapi juga seluruh bagian masyarakat Bali yang sangat berharap dari sektor penjualan dan jasa. Faktor yang membuat Bali menjadi wisata andalan bagi wisatawan mancanegara adalah karena Bali memiliki kekhasannya sendiri pada masing-masing objek wisata baik itu wisata kebudayaan maupun wisata alamnya. Selain itu wisata Bali juga didukung dengan sarana prasarana pariwisata yang lengkap. Kemudian juga Pulau Bali mendapatkan predikat sebagai salah satu destinasi populer dan terbaik di dunia pada tahun 2020 versi *Trip Advisor*, situs untuk merancang dan memesan perjalanan berbasis di Amerika Serikat⁷⁶. Alasan pencapaian ini adalah karena Bali memiliki keindahan alam, keunikan kebudayaan dan keramahan penduduk setempat. Penghargaan pulau terbaik di dunia untuk Bali ini bukan yang pertama kalinya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	2	-	329.909	414.937
Februari	12	1.293	317.005	454.398
Maret	3	14.617	366.956	463.804
April	9	58.315	410.281	502.870
Mei	8	115.553	439.454	544.492
Juni	1	181.545	478.127	520.792
Juli	-	246.44	541.272	625.569
Agustus	-	276.627	522.063	613.540
September	-	291.115	508.297	591.848
Oktober	2	305.152	458.845	554.892
November	6	287.025	397.522	472.714
Desember	--	376.361	478.382	

Tahunan	43	2.154.045	5.248.113	

Tabel 2.2 Kedatangan Wisman Langsung ke 1
 Sumber : (BALI B. P., 2024)

2.4.1 Keunggulan Wisata Budaya

Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata budaya yang paling ikonik di dunia. Keunikan budaya Bali yang menggabungkan unsur-unsur agama Hindu-Bali, tradisi lokal, seni, dan adat istiadat telah menjadikannya tujuan utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya otentik. Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga kekayaan budaya yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menjadikannya sebagai pusat kebudayaan di Asia Tenggara dan bahkan dunia. Budaya Bali dikenal dengan keindahan dan keberagaman seni tradisionalnya, mulai dari tarian, musik gamelan, upacara keagamaan, hingga seni rupa seperti ukiran dan lukisan Bali. Tradisi ini tidak hanya dipertunjukkan untuk wisatawan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Sebagai destinasi pariwisata budaya global, Bali memiliki pengaruh yang besar dalam mempromosikan keberagaman budaya Indonesia di dunia internasional. Melalui berbagai kegiatan budaya dan festival internasional yang diselenggarakan di Bali, seperti *Bali Arts Festival*, *Ubud Writers & Readers Festival*, dan *Sanur Village Festival*, Bali telah memperkuat citranya sebagai pusat budaya dunia. Seiring dengan berkembangnya industri pariwisata, Bali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian budaya. Pariwisata massal yang berkembang pesat dapat berisiko merusak otentisitas budaya Bali jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, Bali berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan berbagai lembaga dan

masyarakat setempat mengimplementasikan program-program yang berfokus pada pelestarian budaya Bali, seperti penyelenggaraan Festival Desa Adat dan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan wisata berbasis komunitas, di mana wisatawan dapat belajar langsung tentang kebudayaan Bali melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata budaya bagi wisatawan asing, tetapi juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kebudayaan di dunia. Bali seringkali menjadi tuan rumah bagi acara-acara internasional, konferensi, dan pertemuan budaya yang membawa pelancong dan profesional pariwisata dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu global terkait pelestarian budaya dan keberlanjutan pariwisata. Selain itu, keberadaan Bali dalam berbagai media internasional, baik dalam film, dokumenter, maupun iklan pariwisata, semakin memperkuat citranya sebagai tujuan utama untuk menikmati kekayaan budaya dan tradisi. Bali juga sering muncul dalam berbagai penghargaan pariwisata dunia, seperti World Travel Awards yang mengukuhkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Keunggulan Wisata Budaya di Bali sangat mencolok karena Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga sebagai pulau dengan kekayaan tradisi, seni, dan budaya yang mendalam. Bali menawarkan pengalaman budaya yang autentik, yang tidak hanya dapat dilihat melalui objek wisata, tetapi juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Bali adalah pulau dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama Hindu, dan upacara keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap daerah dan desa di Bali memiliki tradisi dan upacara yang unik, serta sering kali dilaksanakan di tempat-tempat suci yang megah. Kehidupan masyarakat Bali sangat erat sekali hubungannya dengan agama

Hindu, sehingga setiap upacara keagamaan menjadi daya tarik tersendiri yang sangat istimewa. Pura merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang tersebar di seluruh Bali. Oleh karena itu, Bali juga di kenal sebagai “Pulau Seribu Pura”. Diantaranya pura yang sangat terkenal adalah :



Gambar 2.3 Pura Tanah Lot 1

Sumber : (Tabanan, 2022)

Pura Tanah Lot adalah salah satu pura yang paling suci dalam agama Hindu Bali dan merupakan bagian dari jaringan pura yang dibangun untuk menghormati Dewa Baruna, yaitu dewa laut dalam agama Hindu Bali. Pura ini memiliki hubungan erat dengan mitologi Bali dan diyakini dibangun pada abad ke-16 oleh seorang pendeta Hindu terkenal bernama Dang Hyang Nirartha. Menurut legenda, Dang Hyang Nirartha melihat keindahan alam di sekitar Tanah Lot dan merasa bahwa tempat ini adalah lokasi yang tepat untuk mendirikan pura yang akan melindungi Bali dari bahaya laut. Selain itu, Pura Tanah Lot juga memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan untuk Dewa Baruna, yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi penduduk Bali yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan mereka. Pura Tanah Lot menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Selain pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan tebing-tebing dramatis yang

menghadap ke Samudra Hindia. Tanah Lot dikelilingi oleh area pesisir yang indah, sehingga menjadikannya sebagai tempat yang populer untuk fotografi dan rekreasi. Di sekitar Pura Tanah Lot, terdapat pasar seni yang menjual berbagai cendera mata khas Bali, seperti kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan. Pengunjung juga dapat menikmati makan di restoran yang berada di kawasan ini, sambil menikmati pemandangan laut yang menakjubkan.



Gambar 2.4 Pura Ulun Danu Beratan 1
Sumber : (Loka, 2018)

Pura ini dibangun pada tahun 1,634 oleh I Gusti Agung Putu dan berfungsi sebagai tempat pemujaan Tri Murti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pura Ulun Danu Beratan juga memiliki peranan penting dalam irigasi pertanian di Bali, mengingat Danau Beratan merupakan sumber air utama bagi daerah sekitarnya. Keindahan Pura Ulun Danu Beratan terletak pada lokasi strategisnya yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan air danau yang jernih. Pemandangan tersebut menciptakan suasana yang tenang dan damai, ideal untuk beribadah maupun bersantai. Saat air danau sedang tinggi, pura terlihat seolah mengapung di atas air, menambah daya tarik visualnya.



Gambar 2.5 Pura Lempuyang 1

Pura Lempuyang adalah salah satu pura yang paling ikonik dan suci di Bali. Terletak di sisi timur pulau, dekat dengan Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem, pura ini sering disebut sebagai "*Gerbang Ke Surga*" karena pemandangan yang menakjubkan dan struktur gerbang pintu terbelah yang sangat khas, yang menghadap ke Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Pura ini dibangun pada abad ke-11 dan merupakan salah satu dari sembilan pura penjuru Bali, yang dipercaya untuk melindungi pulau Bali dari kekuatan negatif dan menjaga keseimbangan di dunia spiritual. Pura ini terkenal dengan *Candi Bentar* atau gerbang pintu terbelah yang sangat fotogenik, yang menghadap ke pemandangan luar biasa Gunung Agung. Gerbang ini, ketika difoto, menciptakan ilusi pemandangan surgawi, sehingga menjadi spot foto populer di kalangan wisatawan.

2.4.3 Implementasi Provinsi Bali dalam Pengembangan Pariwisata Budaya melalui Kebijakan Pemerintah Provinsi

Salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, Bali memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam konteks pariwisata budaya. Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pelestarian

budaya dan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap kekayaan budaya Bali yang sudah dikenal di dunia internasional.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan di Bali tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan pelestarian budaya dan lingkungan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Bali mengadopsi prinsip pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memastikan bahwa tradisi dan budaya Bali tetap terjaga. Sebagai contoh, program *Bali Clean and Green* bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali, sekaligus mempertahankan kesan budaya yang bersih dan alami bagi para wisatawan. Program ini mengajak masyarakat Bali untuk aktif dalam menjaga kebersihan, termasuk dalam kawasan wisata yang memiliki nilai budaya tinggi. Kebijakan pemerintah Bali juga menekankan pada pelestarian warisan budaya Bali sebagai bagian dari daya tarik pariwisata. Bali memiliki banyak situs budaya yang sangat penting, seperti pura, seni ukir, dan tarian tradisional. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menerapkan kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap situs-situs budaya tersebut.

Salah satu inisiatif penting adalah melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Seni Budaya Bali, yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan seni dan budaya Bali dari dampak negatif pariwisata massal. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk melestarikan budaya Bali, khususnya dalam hal penggunaan busana adat. Peraturan ini

mengatur kewajiban penggunaan busana adat Bali pada hari-hari tertentu untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan jati diri Bali. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memperkuat identitas budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi. Bali, yang dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kaya, perlu menjaga kelestarian warisan budaya tersebut. Dengan mewajibkan penggunaan busana adat Bali, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai budaya lokal mereka, serta menjadikannya sebagai simbol kebanggaan dan identitas diri. Peraturan ini mengatur bahwa busana adat Bali harus digunakan pada setiap hari Kamis, serta pada hari-hari penting dalam kalender Bali, seperti Purnama dan Tilem yang merupakan penanggalan Bali, dan juga pada peringatan Hari Jadi Provinsi Bali yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. Penetapan hari-hari tertentu ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pegawai negeri untuk secara rutin mengenakan busana adat, sehingga tidak hanya menjadi sebuah tradisi, tetapi juga sebuah kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk tidak hanya melestarikan busana adat sebagai bagian dari budaya Bali, tetapi juga untuk memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai budaya Bali kepada dunia luar. Bagi masyarakat Bali, kebijakan ini juga menjadi cara untuk meneguhkan jati diri mereka dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin mengancam keberadaan budaya lokal. (2018)

Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pengamanan lingkungan yang berbasis pada kekuatan desa adat di Bali. Peraturan ini dikenal

dengan nama SIPANDU BERADAT, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bali dengan melibatkan peran serta masyarakat adat secara langsung. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, yang menjadi dasar filosofi pembangunan Bali, yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Dengan mengintegrasikan budaya Bali ke dalam sistem pengamanan, peraturan ini bukan hanya menjaga aspek keamanan fisik, tetapi juga melestarikan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak lama. Desa adat, yang selama ini dikenal memiliki peran penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, kini menjadi garda terdepan dalam sistem pengamanan lingkungan. Desa adat di Bali memiliki struktur dan kekuatan adat yang diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Dalam hal ini, desa adat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek keamanan lingkungan yang ada di wilayah mereka. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata kelola yang jelas dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT, memastikan adanya sinergi yang baik antara semua komponen yang terlibat, baik itu masyarakat adat, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan sistem pengamanan ini. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Bali. (PERATURAN, 2020)

Pemerintah Provinsi Bali juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali, menjadikan Tri Hita Karana dan kearifan local Sad Keerrthi sebagai acuan dalam praktik-praktik pariwisata. Dalam peraturan ini, Bali diharapkan mampu mengembangkan potensi pariwisatanya dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas Pulau Dewata. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penetapan

destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria tertentu, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Ini diharapkan bisa memastikan bahwa pariwisata yang berkembang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya serta lingkungan sekitar. Salah satu hal penting yang diatur dalam perda ini adalah pengelolaan pramuwisata. Peraturan ini mengharuskan pramuwisata untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), yang berfungsi sebagai identitas resmi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pramuwisata yang bertugas memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk memandu wisatawan, serta mencegah praktik ilegal dalam industri pariwisata. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pembentukan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, yang akan mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata, termasuk pengusaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat. Melalui portal ini, wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan reservasi untuk berbagai kebutuhan wisata, seperti hotel, tiket destinasi wisata, dan layanan transportasi. (PERATURAN, JDIH BPK DATABASE PERATURAN)

Selain itu, kebijakan pemerintah juga mencakup pelatihan bagi masyarakat lokal dalam menjaga dan mempromosikan budaya mereka, seperti melatih penduduk setempat untuk menjadi pemandu wisata yang kompeten dalam mengedukasi wisatawan mengenai budaya Bali. Hal ini juga dilakukan melalui program *Bali Culture Trust* yang mendukung konservasi dan pengelolaan aset budaya Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya untuk membangun infrastruktur pariwisata yang mendukung keberlanjutan budaya lokal. Pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan dilakukan dengan tetap memperhatikan arsitektur Bali yang tradisional dan selaras dengan lingkungan sekitar. Contohnya, kawasan wisata di Ubud

dan Gianyar yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya telah dibangun dengan tetap menjaga suasana dan nuansa Bali. Banyak hotel dan penginapan di Bali yang menggunakan desain tradisional Bali dalam bangunannya, seperti penggunaan material alami dan pengaturan taman yang mencerminkan filosofi Bali yang harmonis dengan alam. Pemerintah Provinsi Bali secara aktif mendukung dan menyelenggarakan berbagai event budaya internasional untuk menarik wisatawan dan mempromosikan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya. Salah satu acara yang sangat penting adalah *Bali Arts Festival*, yang telah berlangsung sejak tahun 1979 dan menjadi ajang tahunan untuk memamerkan seni dan budaya Bali, termasuk tarian, musik, dan kerajinan tangan.

Selain itu, Bali juga menjadi tuan rumah bagi festival internasional lainnya, seperti *Ubud Writers & Readers Festival* yang mendatangkan penulis dan pembaca dari berbagai penjuru dunia untuk merayakan kebudayaan dan sastra Bali. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkenalkan budaya Bali kepada wisatawan mancanegara, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Sebagai bagian dari upaya pengembangan pariwisata yang berorientasi pada budaya lokal, pemerintah Bali juga mendorong pengembangan wisata berbasis desa adat. Program ini mendukung pelibatan masyarakat desa dalam industri pariwisata dan mengedukasi wisatawan mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang sangat kental dengan tradisi dan budaya. Dengan adanya program wisata berbasis desa adat, wisatawan dapat lebih mendalam mengenal kebudayaan Bali yang sesungguhnya, seperti mengikuti upacara keagamaan, belajar membuat kerajinan tangan, dan menyaksikan pertunjukan seni tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga membantu pelestarian budaya melalui interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal.

BAB III

IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN UN TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA

3.1 Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

3.1.2 Gastronomy Tourism Club

Kolaborasi UN *Tourism* dan Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa proyek penting terutama dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Ubud. Salah satu inisiatif utama adalah penetapan Ubud sebagai destinasi gastronomi dunia, yang bertujuan untuk menjadikannya pusat gastronomi berkelanjutan. Proyek ini mencakup pembentukan *Gastronomy Tourism Club* di Ubud, yang akan menjadi platform bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mempromosikan pariwisata gastronomi dan meningkatkan daya tarik Ubud bagi wisatawan. Proyek ini dibagi menjadi tiga fase: pertama, analisis dan diagnosis sumber daya gastronomi di Ubud serta evaluasi permintaan pasar; kedua, desain teknis untuk mengembangkan pengalaman pariwisata gastronomi; dan ketiga, pengembangan rencana bisnis yang mencakup indikator untuk mengukur dampak proyek serta merancang pengalaman gastronomi dan model bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Ubud juga terlibat dalam forum-forum internasional yang diselenggarakan oleh UNWTO, seperti *UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism* di Spanyol, yang bertujuan untuk mempromosikan Ubud sebagai destinasi gastronomi global. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pariwisata tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan mengangkat makanan tradisional Bali dan melibatkan masyarakat dalam praktik pertanian serta kuliner yang berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif ini, Bali, khususnya Ubud, berupaya untuk mengembangkan pariwisata gastronomi yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal. Kerjasama dengan UNWTO memberikan pengakuan global terhadap potensi gastronomi

Bali dan memperkuat komitmen untuk pelestarian budaya lokal. Proyek Pengembangan Produk Wisata Gastronomi UNWTO di Ubud dikembangkan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan untuk mengembangkan wisata gastronomi sebagai pilar warisan budaya dan gastronomi serta meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Diluncurkan pada tahun 2018, proyek ini sempat ditunda selama pandemi dan kembali dilaksanakan pada awal tahun ini. Proyek ini dibagi menjadi tiga tahap:

- **Tahap 1:** Analisis dan diagnosis: inventarisasi dan evaluasi sumber daya gastronomi, analisis indikator permintaan, studi pasar, posisi online dan influencer dalam pariwisata gastronomi
- **Tahap 2:** Desain teknis: konformasi pengembangan pengalaman Pariwisata Gastronomi di Ubud, termasuk model tata kelola, komunikasi dan penentuan posisi
- **Tahap 3:** Pengembangan rencana bisnis: definisi indikator untuk mengukur dampak dan hasil proyek, desain dan format pengalaman gastronomi, model bisnis dan rencana komunikasi untuk pasar sumber utama.

Bagian dari kunjungan akhir proyek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyelenggarakan lokakarya bagi para pemangku kepentingan lokal dari sektor publik dan swasta di Ubud untuk membahas hasil proyek. Lokakarya ini akan mengundang peserta dari Organisasi Manajemen Destinasi regional dan lokal, serta perwakilan dari bisnis terkait gastronomi dan akademisi, untuk membahas rencana aksi dan langkah ke depan untuk mengubah Ubud menjadi pusat global pengalaman gastronomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan autentik. Lokakarya ini juga akan berfokus pada langkah selanjutnya, seperti

pembentukan Klub Pariwisata Gastronomi untuk mendukung model tata kelola yang terstruktur



Gambar 3.1 Workshop for UNWTO Gastronomy 1

Sumber : (Tourism, UN Tourism, 2023)

3.1.3 Best Village Desa Wisata Jatiluwih

Salah satu proyek terbaru yang dilakukan oleh Provinsi Bali dan UN Tourism adalah penetapan Desa Jatiluwih sebagai salah satu Desa Terbaik Dunia 2024. Desa Jatiluwih, yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali, menerima penghargaan prestisius ini dari UN Tourism dalam sebuah acara di Kolombia. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Desa Jatiluwih dalam menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, menjaga kelestarian budaya, serta mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

Menurut John Ketut Purna, Kepala Pengelola Desa Wisata Jatiluwih, desa ini terpilih dari lebih dari 260 aplikasi yang berasal dari lebih dari 60 negara. Keberhasilannya didasarkan pada komitmen yang kuat dalam melestarikan warisan budaya, menjaga keseimbangan ekologi, serta mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab. Pengakuan ini menempatkan Jatiluwih di antara destinasi wisata pedesaan terbaik di dunia dan memperlihatkan dedikasi Indonesia dalam mengedepankan pariwisata berbasis tradisi lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat dalam menjaga budaya dan ekosistem desa melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Salah satu aspek utama yang mendukung penghargaan ini adalah sistem Subak, yakni metode irigasi berbasis komunitas yang telah digunakan selama lebih dari seribu tahun. Subak tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengairan, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong dan keseimbangan antara masyarakat Bali dan lingkungannya. Sejak tahun 2012, UNESCO telah mengakui Jatiluwih dan sistem Subak sebagai Situs Warisan Dunia, menegaskan pentingnya praktik tradisional ini dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Keunikan sistem subak, keindahan panorama sawah terasering, serta kekayaan budaya lokal menjadikan Jatiluwih sebagai destinasi wisata yang bernilai tinggi. Dalam upaya menjaga kelestarian dan pengembangan desa wisata ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan sejumlah regulasi strategis.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan desa wisata di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, termasuk Jatiluwih. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai aspek pengelolaan desa wisata, mulai dari pengembangan industri pendukung pariwisata, pengelolaan objek wisata, strategi pemasaran, hingga pembentukan kelembagaan desa wisata yang kuat dan profesional. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menciptakan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan lingkungan.

Pengelolaan finansial kawasan wisata juga diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tiket Masuk Obyek Wisata. Peraturan ini

memungkinkan pemerintah daerah dan desa untuk menarik retribusi dari pengunjung, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pengembangan dan pelestarian desa wisata. Dengan mekanisme ini, Desa Jatiluwih mampu memperoleh pendapatan asli desa (PADes) yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan pariwisata.

Pengakuan atas keberhasilan Jatiluwih dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pengembangan pariwisata semakin ditegaskan dengan penghargaan sebagai Desa Wisata Berkelanjutan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan penerapan regulasi yang tepat sasaran dan partisipatif, serta kerja sama erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Dengan adanya kebijakan yang berpihak pada pelestarian dan pemberdayaan, Desa Wisata Jatiluwih terus berkembang menjadi model ideal pariwisata berkelanjutan, tidak hanya untuk Bali, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia.



Gambar 3.2 Best Tourism Village 1

Sumber : (UNWTO, 2024)

3.2 Alasan Pemerintah Provinsi Bali Melakukan Paradiplomasi

3.2.1 *Cultural Distinctiveness and Nationalism*

Menurut Rodrigo Tavares dalam bukunya yang berjudul *Paradiplomacy Cities and States as Global Players* mengatakan bahwa pemerintah subnasional terlibat dalam paradiplomasi karena mereka melihatnya sebagai cara yang efektif untuk memajukan

kepentingan mereka di dunia yang semakin saling terhubung. Mereka ingin meningkatkan ekonomi mereka, memperkuat otonomi mereka, memberikan layanan publik yang lebih baik, mengisi kekosongan dalam pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan konstituen mereka, dan meningkatkan profil mereka di panggung global. Paradiplomasi bukan lagi hanya sekadar aktivitas sampingan, tetapi telah menjadi bagian integral dari tata kelola global modern.

Tavares menyebutkan bahwa *sub-state* melakukan paradiplomasi karena beberapa alasan yakni :

1. *Promote Decentralization* (Mempromosikan Desentralisasi)

Desentralisasi adalah proses mengalihkan kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah subnasional (daerah, lokal). Ini bisa mencakup desentralisasi fiskal (transfer anggaran), desentralisasi administratif (delegasi wewenang), dan desentralisasi politik (pemilihan kepala daerah). Promosi desentralisasi seringkali didorong oleh keinginan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, responsivitas terhadap kebutuhan lokal, dan partisipasi masyarakat.

2. *Personal Interest* (Kepentingan Pribadi)

gacu pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat atau pemimpin yang bertujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri secara pribadi, baik secara finansial, politik, atau sosial. Ini bisa mencakup korupsi, nepotisme, atau penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

3. *Electoral Opportunism* (Opportunisme Elektoral)

Ini adalah strategi yang digunakan oleh politisi atau partai politik untuk memanfaatkan situasi atau isu

yang ada demi meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pemilihan. Ini bisa mencakup membuat janji-janji yang tidak realistis, mengeksploitasi ketakutan atau prasangka, atau mengubah posisi mereka pada isu-isu tertentu untuk menarik dukungan pemilih.

4. *Address Local Claims* (Menanggapi Tuntutan Lokal)

Pemerintah subnasional seringkali terlibat dalam paradiplomasi untuk menanggapi tuntutan atau kebutuhan spesifik dari komunitas lokal mereka. Ini bisa mencakup memperjuangkan kepentingan ekonomi lokal, melindungi lingkungan, atau mempromosikan budaya lokal

5. *Cultural Distinctiveness and Nationalism* (Keunikan Budaya dan Nasionalisme)

Pemerintah subnasional seringkali menggunakan paradiplomasi untuk mempromosikan identitas budaya mereka yang unik dan untuk memperkuat rasa nasionalisme di wilayah mereka. Ini bisa mencakup mendukung seni dan budaya lokal, mempromosikan bahasa daerah, atau merayakan sejarah dan tradisi lokal. Perlu dicatat bahwa "nasionalisme" dalam konteks ini mengacu pada sentimen kebangsaan di tingkat subnasional, bukan nasionalisme negara bangsa secara keseluruhan.

6. *Diaspora*

Diaspora adalah populasi orang-orang yang telah tersebar dari tanah air mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah subnasional seringkali menjalin hubungan dengan diaspora mereka untuk mempromosikan budaya, perdagangan, dan investasi. Diaspora dapat menjadi sumber daya yang berharga

untuk pemerintah subnasional, menyediakan jaringan, pengetahuan, dan modal.

7. *Geography*

Faktor geografi dapat memainkan peran penting dalam paradiplomasi. Pemerintah subnasional yang berbatasan dengan negara lain mungkin terlibat dalam kerjasama lintas batas untuk mengatasi masalah bersama seperti perdagangan, lingkungan, atau keamanan. Lokasi strategis juga dapat memberikan keuntungan ekonomi atau politik bagi pemerintah subnasional.

8. *Overcome Isolationism* (Mengatasi Isolasionisme)

Pemerintah subnasional mungkin terlibat dalam paradiplomasi untuk mengatasi isolasionisme atau kurangnya hubungan dengan dunia luar. Ini terutama relevan bagi wilayah-wilayah yang terpencil, terpinggirkan, atau memiliki sejarah isolasi. Paradiplomasi dapat membantu mereka membangun hubungan baru, menarik investasi, dan meningkatkan integrasi mereka ke dalam ekonomi global.

Cultural Distinctiveness and Nationalism merujuk pada kekayaan dan keunikan warisan budaya Bali yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara serta sentiment kebangsaan atau identitas regional yang kuat di tingkat Provinsi Bali. Masyarakat Bali memiliki kebanggaan dan kesetiaan yang mendalam terhadap budaya, tradisi, dan wilayah mereka. Masyarakat melihat Bali sebagai entitas budaya yang berdaulat, dengan hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk melindungi warisan budaya Bali dari komersialisasi dan degradasi akibat pariwisata massal.

Ini dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti regulasi pembangunan, pembatasan kegiatan wisata di tempat-tempat sacral, dan dukungan terhadap seni dan budaya tradisional (TAVARES, 2016).

Pemerintah Provinsi Bali ingin mengembangkan pariwisata yang menghormati dan melestarikan budaya Bali, bukan hanya sekedar mengeksploitasinya. Hal ini dilakukan dengan mendorong wisatawan untuk belajar tentang budaya Bali, berpartisipasi dalam kegiatan budaya local, dan mendukung ekonomi local. Paradiplomasi dipandang sebagai instrument yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Melalui paradiplomasi, Pemerintah Provinsi Bali ingin mempromosikan citra Bali sebagai destinasi wisata budaya yang unik dan berkualitas dengan berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional, menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti UN *Tourism* untuk menerapkan praktik-praktik pariwisata budaya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sector pariwisata, mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan. UN *Tourism* memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. UN *Tourism* dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemahaman mereka tentang budaya Bali.

Cultural Distinctiveness and Nationalism tidak hanya mempromosikan identitas budaya asli dari Provinsi Bali tetapi berfungsi juga memperkuat identitas budaya Bali yang unik di tengah arus globalisasi. Hal ini mendorong masyarakat Bali, termasuk generasi muda, untuk melestarikan seni, tradisi, dan budaya daerah sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Nasionalisme memotivasi pemerintah daerah dan masyarakat Bali

untuk mempertahankan segala sesuatu yang bersifat tradisi, termasuk produk seni dan budaya yang menjadi ciri khas pariwisata Bali. Budaya Bali dianggap memiliki aura atau taksu yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Pemerintah Provinsi Bali menggunakan paradiplomasi untuk mempromosikan citra Bali sebagai destinasi wisata budaya yang unik dan berkualitas. Hal ini dilakukan dengan berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional, menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti *UN Tourism*, dan mempromosikan budaya Bali melalui berbagai platform. Dalam pengembangan pariwisata, nasionalisme berperan sebagai filter untuk memastikan bahwa pembangunan tetap selaras dengan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali. Hal ini penting untuk mencegah komersialisasi budaya yang berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Masyarakat Bali memiliki kebanggaan dan kesetiaan yang mendalam terhadap budaya, tradisi, dan wilayah mereka. Mereka melihat Bali sebagai entitas budaya yang berdaulat, dengan hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Dengan demikian, nasionalisme menjadi kekuatan pendorong bagi paradiplomasi Bali dalam mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan, menjaga identitas daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 *International Policies (Kebijakan Internasional)*

Kebijakan *UN Tourism* tentang pengembangan pariwisata budaya berfokus pada pemanfaatan kekayaan budaya dunia untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. *UN Tourism* memandang pariwisata budaya sebagai salah satu pilar utama dalam industri pariwisata global, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi, memperkenalkan budaya lokal, dan memperkuat hubungan internasional.

Salah satu tujuan utama kebijakan *UN Tourism* dalam pengembangan pariwisata budaya adalah untuk melestarikan warisan budaya dunia. Ini mencakup situs-situs bersejarah, tradisi, seni, dan kerajinan tangan yang menjadi identitas suatu negara atau daerah. UNWTO mendukung upaya perlindungan dan pelestarian situs-situs budaya ini dengan bekerja sama dengan berbagai negara anggota, serta mendorong penerapan standar yang ketat dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Selain itu, *UN Tourism* juga mengedepankan pentingnya keseimbangan antara manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pariwisata budaya dengan upaya untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Dalam kebijakan ini, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang memperkenalkan dan mengedepankan nilai-nilai budaya yang ada di seluruh dunia.

UN Tourism juga mengajak negara-negara untuk mempromosikan model pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam proses pengembangan pariwisata. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata budaya dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan memperkenalkan dan merayakan budaya lokal melalui festival, pameran seni, dan kegiatan tradisional, *UN Tourism* berusaha untuk meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman budaya serta mempererat pemahaman antarbangsa. *UN Tourism* memandang pariwisata budaya sebagai pilar utama dalam industri pariwisata global, dengan fokus pada pemanfaatan kekayaan budaya dunia untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata budaya *UN Tourism* meliputi :

1. *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan)

Pemanfaatan sumber daya lingkungan yang optimal, menghormati social budaya masyarakat, dan memastikan kegiatan ekonomi yang layak dan berjangka panjang. Pariwisata berkelanjutan berupaya meminimalkan dampak negative terhadap sumber daya alam dan budaya, serta memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat local.

2. Pelestarian Warisan Budaya

Menjaga keaslian situs budaya dan tradisi, prinsip utamanya meliputi kesadaran akan perubahan iklim, perhatian pada nilai intrinsic warisan budaya, menghormati keaslian dan kepercayaan budaya local, serta melestarikan warisan budaya

3. Wisata Berbasis Komunitas

UN *Tourism* mengikutsertakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya dan lingkungan

4. Best Tourism Villages

menjadikan pariwisata sebagai pendorong utama kemakmuran pedesaan melalui *Upgrade Programme*.

Kebijakan pariwisata budaya yang diterapkan oleh UN *Tourism* memberikan dampak yang sangat besar dalam praktik paradiplomasi dan pengembangan pariwisata budaya di Provinsi Bali. Kebijakan ini membantu Bali untuk mengembangkan pariwisata yang mengutamakan keberlanjutan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal, yang berpengaruh dalam memperkuat paradiplomasi Bali. Kebijakan pariwisata berkelanjutan yang diterapkan UN *Tourism* mengarahkan Bali untuk mengelola pariwisata dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan budaya. Bali, sebagai

destinasi wisata internasional, mengadopsi prinsip ini dengan berbagai inisiatif ramah lingkungan. Bali dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara yang juga menerapkan prinsip keberlanjutan, serta ikut terlibat dalam forum internasional mengenai pariwisata berkelanjutan. Ini memberikan peluang bagi Bali untuk mendapatkan pengakuan global sekaligus menarik wisatawan yang peduli pada keberlanjutan.

Pelestarian budaya merupakan bagian penting dari kebijakan UN *Tourism*, yang berfokus pada penguatan warisan budaya Bali yang kaya. Melalui kebijakan ini, Bali dapat menjaga tradisi adat dan budaya lokal sambil memperkenalkan budaya Bali di dunia internasional. Dalam hal paradiplomasi, Bali berpeluang memperkuat hubungan dengan negara-negara lain yang mendukung pelestarian budaya, dengan berpartisipasi dalam forum internasional seperti UNESCO dan pertukaran budaya global. Ini juga memungkinkan Bali untuk lebih dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang dilindungi dan dihargai oleh dunia.

3.2.3 Legal Framework

Protocol of Intent (Letter of Intent atau Memorandum Kesepahaman (MoU)). Ini adalah dokumen yang mengungkapkan kesepakatan bersama mengenai suatu permasalahan antara dua pihak atau lebih. Benar secara umum diakui mengikat, meskipun tidak ada tuntutan hukum yang dapat diajukan berdasarkan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Agar dapat berjalan secara hukum, suatu MoU harus (1) mengidentifikasi pihak-pihak yang mengadakan kontrak; (2) menguraikan pokok perjanjian dan tujuannya; (3) merangkum syarat-syarat penting perjanjian; dan (4) harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (TAVARES, 2016).

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bali dan UNWTO (United Nations World Tourism Organization) merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan

untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan sektor pariwisata di Bali, khususnya dalam bidang pariwisata berkelanjutan dan pelestarian budaya. MoU ini sangat relevan bagi Bali sebagai destinasi wisata internasional yang memiliki keanekaragaman budaya dan alam yang kaya, sekaligus menghadapi tantangan dalam mengelola dampak negatif pariwisata massal. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan UNWTO dalam MoU ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Bali. Beberapa fokus utama dari MoU tersebut antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan program yang mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini termasuk pengelolaan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana.
2. Mendukung upaya pelestarian tradisi budaya Bali, termasuk seni, upacara adat, arsitektur, dan kerajinan tangan. Dalam hal ini, UNWTO akan memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, serta kerjasama internasional untuk menjaga dan mempromosikan budaya Bali di dunia.
3. Mengembangkan wisata berbasis komunitas yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat Bali. Ini mencakup pemberdayaan desa-desa adat, yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan budaya.
4. Mendorong pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi karbon di sektor pariwisata.
5. Melibatkan desa-desa Bali yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata yang menonjol dengan mempromosikan keberlanjutan dan pelestarian budaya.

Program ini dapat meningkatkan profil desa wisata Bali di kancah internasional.

6. Menggunakan jaringan internasional UNWTO untuk mempromosikan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan. Bali dapat memanfaatkan platform global untuk menarik wisatawan yang peduli dengan keberlanjutan dan pelestarian budaya.



Gambar 3.4 Penandatanganan MoU 1

Sumber : (BALI A. , 2015)

Penandatanganan MoU (nota kesepahaman) komitmen pelaksanaan kode etik kepariwisataan dunia antara Komite Etik Pariwisata Dunia (UNWTO) dengan Yayasan Tri Hita Karana Bali diapresiasi oleh Wakil Gubernur Bali. Penandatanganan *Global Code of Ethics for Tourism*. *Global Code of Ethics for Tourism* adalah seperangkat prinsip yang dirancang untuk memandu pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, lingkungan, warisan budaya, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan menandatangani komitmen ini, Harris & POP! Hotels Cokroaminoto Denpasar menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan bisnis pariwisata yang etis dan berkelanjutan.

MoU ini bertujuan untuk menyinergikan antara kode etik dunia dengan konsep Tri Hita Karana (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan lingkungan)

yang memiliki tujuan yang sangat baik¹. Konsep THK merupakan wahana terbaik untuk mengadaptasi pengaruh globalisasi, sekaligus mengkonservasi jati diri, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Bali.

Global Code of Ethics for Tourism sendiri adalah pedoman yang dikeluarkan oleh UNWTO untuk memastikan bahwa pariwisata dijalankan secara bertanggung jawab, menghormati budaya lokal, serta memberi manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks Bali, penerapan kode etik ini sangat relevan mengingat pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor utama perekonomian, sekaligus tantangan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya.

Dengan adanya MoU ini, Bali dapat menjadi contoh bagi destinasi wisata lain dalam mengelola pariwisata yang berorientasi pada etika dan keberlanjutan. Apresiasi dari Wakil Gubernur Bali juga mencerminkan komitmen daerah tersebut untuk terus memperkuat reputasinya sebagai destinasi wisata yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB IV

ANALISIS PARADIPLOMASI PROVINSI BALI DAN UN TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA

4.1 Pengaruh Program Gastronomy Tourism Club terhadap Pengembangan Wisata Kuliner di Bali

Gastronomy Tourism Club merupakan salah satu platform global yang dibentuk oleh UN Tourism untuk memajukan pariwisata kuliner di berbagai negara anggota. Di Bali, keberadaan program ini membuka peluang lebih besar bagi pengembangan potensi kuliner tradisional sebagai daya tarik wisata utama. Sebelumnya, kuliner Bali seringkali hanya menjadi pelengkap dari wisata budaya atau alam. Namun melalui program ini, kuliner lokal mulai dikembangkan sebagai bentuk ekspresi budaya yang berdiri sendiri dan memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional.

Masakan khas Bali seperti *ayam betutu*, *sate lilit*, *lawar*, dan produk fermentasi seperti *arak Bali*, mulai dipromosikan secara lebih luas dalam berbagai kegiatan festival kuliner, promosi digital, dan kerja sama antarnegara. Selain itu, program ini juga mendorong pendekatan *farm-to-table*, yang menghubungkan petani lokal dengan sektor perhotelan dan restoran. Salah satu contoh penerapannya terjadi di kawasan Jatiluwih, di mana hasil pertanian organik seperti beras merah dan kopi lokal menjadi bagian dari paket wisata kuliner yang ditawarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain mendukung promosi dan inovasi produk kuliner, Gastronomy Tourism Club juga mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaku UMKM kuliner dan petani diberikan pelatihan mengenai keamanan pangan, penyajian hidangan secara profesional, serta strategi pemasaran digital. Dampaknya, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek dalam industri pariwisata, melainkan berperan aktif sebagai produsen dan pengelola destinasi wisata kuliner yang berkualitas.

4.2 Pengaruh Program Best Tourism Villages terhadap Desa Jatiluwih

Program *Best Tourism Villages* yang diinisiasi oleh UN Tourism merupakan upaya global untuk mendorong pengembangan desa-desa wisata yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu desa di Indonesia yang menerima penghargaan ini adalah Desa Jatiluwih, yang terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Terpilihnya Jatiluwih sebagai salah satu *Best Tourism Villages 2023* membawa dampak yang besar di berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan desa tersebut.

Jatiluwih sejak lama dikenal sebagai kawasan pertanian dengan sistem irigasi tradisional *subak*, yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Namun, penghargaan dari UN Tourism ini memberikan pengakuan yang lebih luas bahwa desa tersebut tidak hanya penting dalam konteks budaya agraris, tetapi juga layak menjadi model pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas.

Salah satu pengaruh utama dari program ini adalah meningkatnya pengakuan internasional terhadap nilai-nilai lokal dan sistem sosial budaya yang masih terjaga di Jatiluwih. Penghargaan dari UN Tourism mendorong promosi Jatiluwih sebagai destinasi wisata internasional yang tidak hanya menawarkan lanskap sawah berundak yang indah, tetapi juga pengalaman otentik kehidupan desa Bali. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang tertarik untuk berkunjung dan belajar tentang kehidupan agraris dan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi dasar kehidupan masyarakat desa.

Partisipasi Jatiluwih dalam program *Best Tourism Villages* mempercepat proses peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata. Pemerintah daerah, dengan dukungan dari mitra pembangunan dan komunitas internasional, mulai membenahi akses jalan menuju desa, memperluas jalur trekking yang ramah lingkungan, serta membangun fasilitas penunjang seperti tempat parkir, toilet umum, dan pusat informasi

wisata. Namun, seluruh pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian alam dan kearifan lokal.

Dampak positif lainnya adalah adanya **penguatan kapasitas masyarakat lokal**. Program ini membuka akses pelatihan bagi warga desa dalam bidang hospitality, pelayanan wisata, bahasa asing, pengelolaan homestay, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, masyarakat Jatiluwih tidak hanya menjadi objek dalam industri pariwisata, tetapi juga subjek aktif yang mampu mengelola dan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata. Dalam konteks ini, program *Best Tourism Villages* sejalan dengan semangat *community-based tourism* yang selama ini didorong oleh pemerintah Bali.

Program ini juga mendorong diversifikasi produk wisata. Jatiluwih tidak hanya dikenal karena sawahnya, tetapi juga mulai mengembangkan wisata edukasi pertanian, kelas memasak makanan tradisional Bali, serta promosi produk-produk unggulan seperti beras organik, kopi robusta lokal, dan hasil olahan herbal. Dengan adanya dukungan dari UN Tourism, potensi-potensi lokal ini mulai dikemas secara profesional untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa.

Pengaruh program ini juga dapat dilihat dari peningkatan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya konservasi budaya dan lingkungan. Dengan label “desa wisata terbaik dunia”, muncul dorongan moral yang kuat dari warga untuk mempertahankan gaya hidup tradisional, melestarikan sistem *subak*, dan mengelola sampah serta limbah wisata secara lebih bertanggung jawab. Kesadaran ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pariwisata di Jatiluwih ke depan.

4.3 Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

Dalam pengembangan pariwisata budaya Bali, peran paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan dukungan dari UN Tourism memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali sekaligus mempromosikan pulau ini sebagai

destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Paradiplomasi mengacu pada keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan internasional untuk mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Bali, sebagai pulau yang kaya akan tradisi dan warisan budaya, membutuhkan sinergi antara kebijakan lokal dan dukungan internasional untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata yang terjadi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi daya tarik utamanya.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui paradiplomasi. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah provinsi adalah penyusunan kebijakan yang mengedepankan pelestarian budaya Bali. Pemerintah Provinsi Bali sadar bahwa pariwisata yang berkembang pesat harus tetap menjaga keseimbangan dengan kelestarian alam dan warisan budaya yang ada. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi dibentuk untuk membatasi dampak negatif pariwisata terhadap situs-situs budaya Bali yang berharga, seperti pura, desa adat, dan kawasan tradisional lainnya.

Selain itu, pemerintah provinsi aktif dalam meningkatkan kerjasama internasional melalui paradiplomasi, untuk memperkenalkan Provinsi Bali sebagai destinasi wisata budaya kepada dunia. Provinsi Bali tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga menjadi tujuan wisata internasional yang menarik minat wisatawan global. Melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti *UN Tourism*, Provinsi Bali berhasil memperoleh pengakuan untuk warisan budayanya, seperti sistem irigasi tradisional Subak, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *UN Tourism*. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya peran paradiplomasi dalam memperkenalkan budaya Bali di tingkat global.

UN Tourism sebagai lembaga internasional yang fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, berperan besar dalam mendukung Bali untuk mengelola pariwisata budaya dengan prinsip keberlanjutan. *UN Tourism* memberikan pedoman dan dukungan kepada

Pemerintah Provinsi Bali agar pengelolaan pariwisata tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa budaya Bali tetap lestari. *UN Tourism* juga membantu Provinsi Bali untuk mengembangkan strategi pemasaran global, sehingga budaya Bali semakin dikenal luas di dunia internasional. Dengan bantuan *UN Tourism*, Bali dapat meningkatkan citra internasionalnya sebagai destinasi yang tidak hanya indah secara alamiah tetapi juga kaya akan tradisi dan seni.

UN Tourism juga turut memberikan pedoman dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk bagaimana Bali bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya. Hal ini sangat penting mengingat pesatnya pertumbuhan pariwisata yang seringkali membawa tantangan tersendiri dalam hal pelestarian situs budaya dan alam Bali. Dalam hal ini, *UN Tourism* memberikan masukan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya yang tidak merusak warisan budaya yang ada.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan *UN Tourism* sangat vital dalam mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan. Melalui paradiplomasi, Bali tidak hanya berhasil menarik wisatawan dari seluruh dunia tetapi juga menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang menjadi identitas pulau ini. Kerjasama internasional yang terjalin memberikan Bali platform untuk mempromosikan dirinya sebagai tujuan wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman budaya yang mendalam dan autentik.

Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dukungan dari *UN Tourism*, Bali terus memperkuat posisinya di dunia internasional sebagai destinasi pariwisata budaya yang tidak hanya menarik tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Bali menjadi contoh bagaimana paradiplomasi dan kerjasama internasional dapat menghasilkan pariwisata yang

berkelanjutan, yang mendatangkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama.

4.3 Dampak Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

Paradiplomasi yang diterapkan oleh Provinsi Bali, bersama dengan program-program yang dibuat telah membawa dampak yang besar terhadap masyarakat lokal dan perkembangan destinasi wisata budaya di Bali. Program seperti *Best Tourism Villages* dan *Gastronomy Tourism* tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi bagi Bali, tetapi juga memiliki dampak langsung yang dapat memberdayakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan budaya yang ada.

Salah satu dampak utama adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang tertarik mengunjungi desa-desa budaya yang diakui oleh UN Tourism, pendapatan masyarakat lokal meningkat. Para pelaku UMKM, seperti pengrajin kerajinan tangan, petani, dan penjual makanan tradisional, mendapatkan keuntungan dari meningkatnya permintaan terhadap produk-produk lokal mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata.

Selain itu, program-program ini juga mendukung pelestarian budaya Bali. Destinasi wisata budaya yang menjadi bagian dari program UN Tourism mendorong masyarakat untuk terus menjaga dan merayakan warisan budaya mereka. Desa-desa wisata, yang sering kali mencakup atraksi seperti tarian tradisional, upacara keagamaan, dan kerajinan tangan, semakin berkomitmen untuk melestarikan tradisi tersebut. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam Bali, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang mendalam tentang kehidupan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Bali, yang membuat mereka merasa terhubung dengan budaya lokal.

Peningkatan infrastruktur juga merupakan dampak nyata dari kebijakan ini. Jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang lebih memadai, dan akomodasi yang lebih nyaman menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan destinasi wisata. Bagi masyarakat lokal, peningkatan ini tidak hanya bermanfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka sehari-hari. Kemudahan akses dan fasilitas yang lebih baik mempermudah kegiatan ekonomi lokal dan membuka peluang baru untuk sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ini juga dapat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di Bali. Banyak destinasi wisata budaya yang terhubung erat dengan alam, seperti sawah terasering di Jatiluwih dan pura-pura yang ada di kawasan pegunungan. Pengembangan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air. Namun, dengan kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan dan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, Bali bisa mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, sehingga manfaat pariwisata bisa dirasakan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

Kebijakan paradiplomasi dan program-program dari UN Tourism dan Provinsi Bali memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat lokal dan pengembangan destinasi wisata budaya di Bali. Dengan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan terhadap budaya lokal, Bali dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang menarik tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah lama dijaga oleh masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama UN Tourism telah memberikan dampak yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Program-program yang dibuat UN *Tourism* dan Provinsi Bali seperti *Gastronomy Tourism Club* dan *Best Tourism Villages*, khususnya pada Desa Jatiluwih, menjadi contoh konkret dari sinergi internasional yang berhasil mendukung pengembangan ekonomi lokal, promosi budaya Bali, serta perlindungan warisan budaya dunia. Desa Jatiluwih yang diakui sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia telah menunjukkan bahwa pariwisata berbasis komunitas dan alam mampu menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. *Gastronomy Tourism Club* menjadi wadah bagi Bali dalam mempromosikan kuliner tradisional sebagai kekayaan budaya yang memiliki daya saing global. Hal ini mendorong penguatan UMKM kuliner, pelestarian resep-resep tradisional, serta integrasi antara pertanian lokal dengan pengalaman wisata kuliner yang unik.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali juga terbukti mampu mengatasi tantangan pariwisata masa kini, seperti overtourism, degradasi budaya, dan ketimpangan manfaat ekonomi. Melalui kerja sama internasional, Bali tidak hanya mengembangkan sistem dan standar pariwisata yang lebih baik, tetapi juga membuka akses ke pelatihan, pendanaan, dan promosi global. Paradiplomasi Provinsi Bali dan UN *Tourism* telah menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan pariwisata budaya Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal serta pelestarian budaya dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2018, P. G. (n.d.). Retrieved FEBRUARI 5, 2025, from <https://diperpa.badungkab.go.id/storage/files/2018pergub0051079.pdf>
- 2018, P. P. (n.d.). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Retrieved Februari 7, 2025, from JDIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85646/pp-no-28-tahun-2018>
- Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, Fikry Zuledy Pamungkas*. (2020). Depok: MELVANA PUBLISHING.
- JatiluwiH bersolek sambut delegasi World Water Forum Ke-10. (2024, Mey 2).
- Aditya, I. (2023, oktober 1). *krjogja*. Retrieved July 5, 2024, from [krjogja: https://www.krjogja.com/nasional/amp/1243104193/panglipuran-bali-desa-wisata-terbaik-versi-unwto](https://www.krjogja.com/nasional/amp/1243104193/panglipuran-bali-desa-wisata-terbaik-versi-unwto)
- AgeingAsiaConf2024. (2024, September 2). *AgeingAsiaConf2024*. Retrieved Februari 5, 2025, from [AgeingAsiaConf2024: https://www.ageingasiaconf2024.org/](https://www.ageingasiaconf2024.org/)
- Anak Agung Mia Intenilia, A. A. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *JURNAL BINA PRAJA*, 23-65.
- Angraini, D. (2015). KERJASAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO). *JOM FISIP*, 1-15.
- Apriliansi, M. (2022). Paradiplomasi Bali dalam Memperkuat Jaringan Pariwisata Global. *researchgate*, 1-9.
- Apriliansi, M. (2024). Paradiplomasi Bali dalam Memperkuat Jaringan Pariwisata Global. *ResearchGate*, 1-10.
- Baiquni, M. H. (n.d.). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI.
- BALI, B. P. (2024). *BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI*. Retrieved Februari 6, 2025, from <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>
- BALI, E. T. (2024, November 3). *ECO TOURISM BALI*. Retrieved Februari 4, 2025, from ECO TOURISM BALI:

<https://ecotourismbali.com/id/2024/11/16/un-tourism-mengumumkan-desa-wisata-terbaik-2024/.com>

Bali, J. P. (2023, Mei 3). *JDIH Pemerintah Provinsi Bali*. Retrieved Februari 5, 2025, from JDIH Pemerintah Provinsi Bali: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/uu/29158>

BALI, S. D. (2023). *SATU DATA INDONESIA PROVINSI BALI*. Retrieved Februari 5, 2025, from SATU DATA INDONESIA PROVINSI BALI: <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-umkm-berdasarkan-kriteria-usaha?year=2023>

Balih. (2024, July 3). *balihbalihan*. Retrieved July 3, 2024, from BalihBalihan: <https://balihbalihan.com/2024/05/04/membangun-kearifan-lokal-dan-pariwisata-berkelanjutan-jatiluwih/>

Blog, G. (n.d.). Retrieved 2 6, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/wisata-budaya-indonesia/>

Bryman, A. (2012). Alan Bryman - Social Research Methods. *SCRIBD*, 1-22.

CAHYANINGTYAS, J. a. (2017). The Implementation of Public Diplomacy through Paradiplomatic Activities for an Effective Place Branding . *J Political Science*, 52-70.

cooking, P. b. (2024). *PAON bali cooking*. Retrieved Februari 5, 2025, from PAON bali cooking: <https://www.paon-bali.com/>

Council, G. G. (2020, Januari 4). *GSTC Global Sustainable Tourism Council* . Retrieved Februari 5, 2025, from GSTC Global Sustainable Tourism Council : <https://www.gstccouncil.org/gstc-sustainable-tourism-training-in-sanur-bali-indonesia/>

Damardjati. (2001). *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta.

DENPASAR, P. (2024, APRIL 1). *POSBALI.NET*. Retrieved JULY 5, 2024, from POSBALI.NET: <https://www.posbali.net/opini/amp/1424541311/wwf-2024-bagi-pariwisata-budaya-bali>

Dewi, M. H. (2013). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*.

Ekklesyia Venny Herlianti, R. B. (n.d.).

- Ekklesyia Venny Herlianti, R. B. (n.d.). DAMOAK POSITIF TERHADAP BUDAYA, EKONOMI, DA LINGKUNGAN .
- Elvianti, I. G. (2021). AFFECTING FACTORS OF SISTER CITY COOPERATION BETWEEN DENPASAR GOVERNMENT AND MOSSEL BAY GOVERNMENT IN 2019 jo. *INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS*, 1-10.
- ETICON. (2021, November 3). Retrieved Februari 5, 2025, from <https://eticon.co.id/pariwisata-berbasis-budaya/>
- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *IP INDONESIAN PERSPECTIVE*, 1-10.
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia:. 1-12.
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *INDONESIAN PERSPECTIVE*, 1-10.
- FIRDAUS, A. F. (2022). DIPLOMASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BALI PADA MASA PANDEMI . *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*, 66-134.
- Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy. (1965). *Center for Public Diplomacy*.
- Gea Martha Andini, D. O. (2024). PARADIPLOMACY AND CLIMATE CHANGE ISSUES: A CASE STUDY OF INDONESIAN ISLANDS INVOLMENT IN GLOBAL COOPERATION TO ADRESS SEA LEVEL RISE. *ResearchGate*, 1-39.
- GNFI, K. (2024, Juli 3). Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali Siap Unjuk Potensi ke Delegasi Forum Air Sedunia.
- Grandi, L. K. (2020). *City Diplomacy*. Swiss: Springer Nature Swiss AG.
- Gullion, E. (1965). *Diplomasi Publik*.
- Hermawan, K. (2020-2023). Sinergi Lokal Sinergi Lokal untuk Dampak Global: Paradiplomasi Bali dalam Pariwisata Berkelanjutan sebagai Diplomasi Publik (2020-2023).
- Hermawan, K. (2024). Sinergi Lokal untuk Dampak Global: Paradiplomasi Bali dalam Pariwisata Berkelanjutan sebagai Diplomai Publik. *ResearchGate*, 1-9.

- Huberman, M. &. (1992). Metode Penelitian. *IAIN Kudus Repository*, 31-35.
- I Gusti Agung Fajar Wisnu Wardana, I. M. (2018). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*.
- I Nengah Subadra, N. M. (n.d.). DAMPAK EKONOMI, SOSIALBUDAYA, DAN LINGKUNGAN. *JURNAL MANAJEMEN PARIWISATA*.
- Iin Choirunnisa Choirunnisa, M. K. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya. *Jurnal Kajian Ruang*, 51-62.
- Iin Choirunnisa Choirunnisa, M. K. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA. *Jurnal Kajian Ruang*, 1-10.
- JASWANDI, L. N. (2013). KESESUAIAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SUBAK.
- JATILUWIH, D. (n.d.). *DESA JATILUWIH*. Retrieved Februari 6, 2025, from <https://jatiluwih.si-desa.com/artikel/99>
- Kaya, I. (n.d.). Retrieved Februari 6, 2025, from <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/pura-ulun-danu-beratan-situs-religi-yang-mempesona-di-tengah-dataran-tinggi-bedugul/>
- Kemenparekraf/Baparekraf. (2024, juni 2). *kemenparekraf*. Retrieved Juli 3, 2024, from kemenparekraf: <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/desa-wisata-jatiluwih-representasi-wisata-berkelanjutan-di-indonesia>
- Kemenparekraf. (202, Juli 5). *Kemenparekraf*. Retrieved November 7, 2024, from Kemenparekraf: https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document_satker/5baa176056e524cfaa5086f5d69b2747.pdf
- KEMENPAREKRAF. (2024, Desember 4). *KEMENPAREKRAF*. Retrieved Februari 5, 2025, from KEMENPAREKRAF: <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-aktif-berpartisipasi-dalam-dua-ajang-bergengsi-un-tourism-di-vietnam>
- Khegie, P. Y. (2020). PARADIPLOMASI PEMERINTAH SAWAHLUNTO TERHADAP UNESCO DALAM MENETAPKAN OMBILIN COAL MINING HERITAGE OF SAWAHLUNTO (OCMHS) SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA. *e-skripsi Universitas Andalas* , 23-60.

- Kurniawati, R. (2021). Paradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector. *researchgate*, 1-6.
- Kurniawati, R. (2021). Paradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector (Paradiplomasi Bali dan Jeju dalam Sektor Pariwisata). *ResearchGate*, 1-6.
- Kurniawati, R. (2022). aradiplomacy of Bali and Jeju in the Tourism Sector. *researchgate*, 1-6.
- Kurniawati, V. A. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City. *GLOBAL POLITICL STUDIES JOURNAL*, 1-10.
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational goverments in international affairs*. New York: Routledge.
- Loka, B. (2018, November 4). *Bali Loka*. Retrieved Februari 6, 2025, from <https://baliloka.home.blog/2018/11/16/ulun-dani-temple/>
- Malang, U. M. (n.d.). *HI UMM*. Retrieved from PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG .
- Malau, H. (2012). Alan Bryman - Social Research Methods. *SCRIBD*, 1-22.
- Marchetti, R. (2021). *City Diplomacy From City-States to Global Cities*. Amerika Serikat: Pers Universitas Michigan.
- Mark Leonard, C. S. (2002). *Public Diplomacy*. United Kingdom: Amazon UK.
- Moch Faisal Karim, T. N. (2023). Informalitas, Paradiplomasi, dan Kerjasama Lintas Batas: Perkembangan Pariwisata di Pulau Bintan, Indonesia. *aSIaN stuDies Review*, 1-20.
- Mudana, I. G. (2018). EKSISTENSI PARIWISATA BUDAYA BALI DALAM KONSEP TRI HITAKARANA. 23-40.
- Muhammad Rifki Bukhari Lesmana, Y. O. (2021-2023). EFEKTIVITAS KERJA SAMA PROVINSI BALI-PROVINSI JEJU PADA BIDANG PARIWISATA TAHUN 2021-2023. *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 50-62.
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1-10.

- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The POLITICS Jurnal Magister Universitas Indonesia*, 1-10.
- Mukti, T. A. (2020). *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*. Yogyakarta: The Phinisi Pres.
- Mukti, T. A. (2020). *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2020). *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2020). *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*. Sleman, Yogyakarta: The Phinisi Team.
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Murrow, F. o. (n.d.). *Public Diplomacy*.
- MUSARINDA, L. C. (2017). STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERBAIKI CITRA INDONESIA PASCA PERISTIWA BOM BALI TAHUN 2002-2012. *UNIVERSITAS AIRLANGGA REPOSITORY*, 1-34.
- Negeri, P. M. (2020). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Retrieved Februari 7, 2025, from JDIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>
- Nisa, H. M. (2021). Paradiplomasi Melalui Sister City Pemerintah Kota Denpasar dan Mossel Bay : Implementasi dan Pengalihan Kerja Sama. *GLOBAL & POLICY Journal of International Relation*.
- Nuradhawati, R. (2021). DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *E-journal FISIP Unjani*.
- PAMAY YOMANDA, K. (2020). PARADIPLOMASI PEMERINTAH SAWAHLUNTO TERHADAP UNESCO DALAM MENETAPKAN OMBILIN COAL MINING HERITAGE OF SAWAHLUNTO (OCMHS) SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA . *e-Skripsi Universitas Andalas*, 20-32.
- PERATURAN, J. B. (2014, Oktober 5). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Retrieved Februari 4, 2025, from JDIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

- PERATURAN, J. B. (2020). *PERATURAN BPK*. Retrieved Februari 5, 2025, from PERATURAN BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/148234/pergub-prov-bali-no-26-tahun-2020>
- PERATURAN, J. B. (n.d.). *JDIH BPK DATABASE PERATURAN*. Retrieved Februari 5, 2025, from JDIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146819/perda-prov-bali-no-5-tahun-2020>
- ppbacid. (2024, Mei 6). *POLITEKNIK PARIWISATA BUDAYA CENTER OF EXCELLENCE*. Retrieved Desember 5, 2024, from POLITEKNIK PARIWISATA BUDAYA CENTER OF EXCELLENCE: <https://ppb.ac.id/category/un-tourism/>
- Prabhawa, I. G. (2024). PERAN UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO). 2-20.
- Prawira, I. G. (2017). Motif Pemerintah Provinsi Bali Dalam Perpanjangan Kerjasama Sister Province Dengan Provinsi Hainan (Tiongkok) Tahun 2017. *repository*, 1-15.
- Putri, N. M. (2024, Mei 2). *detikBali*. Retrieved Desember 5, 2024, from detikbali: <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7321810/un-tourism-conference-bali-dorong-pemberdayaan-perempuan-di-sektor-pariwisata>
- Rachman, A. A. (n.d.).
- Rachman, A. A. (2023, Agustus 2). *THE CONVERSATION*. Retrieved Februari 1, 2025, from THE CONVERSATION: <https://theconversation.com/paradiplomasi-bagaimana-pemerintah-daerah-berperan-sebagai-aktor-diplomasi-internasional-211123>
- Rachman, A. A. (2023, Agustus 2). *theconversation*. Retrieved July 2, 2024, from theconversation: <https://theconversation.com/paradiplomasi-bagaimana-pemerintah-daerah-berperan-sebagai-aktor-diplomasi-internasional-211123>
- Rassanjani, R. N. (2022). MENKAKAJI PELUANG DAN TANTANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK. *Journal of Governance and Social Policy*, 1-17.
- Rassanjani, R. N. (2022). MENKAKAJI PELUANG DAN TANTANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

DALAM KAWASAN INDO-PASIFIK. *Journal of Governance and Social Policy*, 1-17.

Rhismawati, N. L. (2019, November). *ANTARA News Bali* . Retrieved from ANTARA News Bali .

RI, /. (2024, Desember 1). Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menpar-penerapan-pariwisata-berkelanjutan-membawa-desa-wisata-jatiluwi-menjadi-desa-wisata-terbaik-dunia-2024>

RI, B. (n.d.). Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menpar-penerapan-pariwisata-berkelanjutan-membawa-desa-wisata-jatiluwi-menjadi-desa-wisata-terbaik-dunia-2024>

RI, K. (2024, July 3). *Kemenparekraf/Baparekraf RI*. Retrieved July 5, 2024, from Kemenparekraf/Baparekraf RI: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-dukung-pengembangan-pariwisata-berbasis-budaya-di-bali>

RI, K. (2024, Maret 3). *SIARAN PERS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF*. Retrieved Desember 5, 2024, from Kemenparekraf/Baparekraf RI: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-bali-siap-jadi-tuan-rumah-2nd-un-tourism-conference-on-women-empowerment-in-tourism-in-asia-and-the-pacific>

RI, K. (2024, Mei 5). *SIARAN PERS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF* . Retrieved Desember 5, 2024, from Kemenparekraf/Baparekraf RI: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-the-2nd-un-tourism-regional-conference-on-the-empowerment-of-women-in-tourism-in-asia-and-the-pacific-resmi-dibuka-di-bali>

Rifqi. (2023). IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) DALAM RANGKA Mendukung SEKTOR. 20-47.

Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Rajagrafindo.

Sabarno, D. K. (2021). PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI UNTUK SISTER PROVINCE BALI DENGAN HO CHI MINH DI

BIDANG PARIWISATA . *Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, 20-40.

- Sabir, M. (1987). *Politik bebas aktif*. Jakarta: Jakarta : Haji Masagung., 1987.
- Sausan Maulifa Wahyudi, E. Y. (2022). Struktur Jaringan Spasial Ekonomi Pariwisata di Aglomerasi. *JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA*, 1-13.
- Schiavon, J. A. (2019). *Comparative Paradiplomacy*. New York: Routledge.
- Sirsya, S. S. (2024). Efektivitas Paradiplomasi Kerjasama Sister City Kota Denpasar dan Kota Mossel Bay Pada Tahun 2019-2023. *UPN Veteran Jawa Timur.*, 1-60.
- Sohaela Amiri, E. S. (2020). *City Diplomacy Current Trend and Future Prospects*. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
- Sohaela Amiri, E. S. (n.d.). *City Diplomacy* .
- Suci, E. (2023). Analisis Faktor Penentu Pelaksanaan Paradiplomasi 34 Provinsi di Indonesia. *DIGITAL REPOSITORY UNILA*, 1-56.
- Suweta, I. M. (2018). KEBUDAYAAN BALI DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA. 2-14.
- Suweta, I. M. (2018). KEBUDAYAAN BALI DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA. 1-14.
- Suweta, I. M. (2019). KEBUDAYAAN BALI DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN BUDAYA. 4-14.
- Suza, P. (2021). Paradiplomasi Pemerintah Daerah dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Batam. *repository unsri*, 1-45.
- Tabanan, A. A. (2022). *Destinasi Wisata Pura Tanah Lot Incaran Banyak Wisatawan*. Tabanan: BeritaTabanan.com.
- tataruangadmin. (2020, Februari 6). *Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih*. Retrieved Juli 7, 2024, from tarubali.baliprov: <https://tarubali.baliprov.go.id/kawasan-warisan-budaya-jatiluwih/>
- TAVARES, R. (2016). *PARADIPLMACY Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Tegar Citra Samudera, A. S. (2024). IMPLEMENTASI KERJA SAMA SISTER CITY DENPASAR-MOSSEL BAY DALAM UPAYA

PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 40-62.

Tourism, U. (2023, Desember 4). *UN Tourism*. Retrieved Februari 4, 2025, from <https://www.unwto.org/news/unwto-completes-gastronomy-tourism-project-for-ubud-indonesia>

Tourism, U. (2024, November 3). *UN Tourism*. Retrieved Desember 5, 2024, from UN Tourism: <https://www.unwto.org/news/un-tourism-announces-best-tourism-villages-2024-55-rural-communities-shaping-the-future-of-sustainable-travel>

Tourism, U. (n.d.). *UN Tourism*. Retrieved from UN Tourism: <https://www.unwto.org/>

Tourism, U. (n.d.). *UN Tourism*. Retrieved februari 2, 2025, from UN Tourism: <https://www.unwto.org/tourism-and-culture>

ULANDARI, M. a. (2023). STRATEGI PARADIPLOMASI PUBLIK DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENINGKATKAN WISATAWAN MANCANEGARA 2019-2022. *REOSITORI UMRAH*, 1-54.

umm, h. (2017, Juli 4). *hi umm*. Retrieved Desember 5, 2024, from hi umm.

UNESCO, K. (2017, Juni 3). *KWRI UNESCO*. Retrieved Februari 5, 2025, from <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/jatiluwig-yang-didatangi-obama-punya-predikat-situs-warisan-dunia/>

UNWTO. (2023, Agustus 5). *UNWTO*. Retrieved November 7, 2024, from UNWTO: https://www-unwto-org.translate.google/about-us?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

UNWTO. (2024, November 3). Retrieved Februari 6, 2025, from <https://www.unwto.org/news/un-tourism-announces-best-tourism-villages-2024-55-rural-communities-shaping-the-future-of-sustainable-travel>

Vero Alfiansyah, E. P. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City . *GLOBAL POLITICAL STUDIES JOURNAL*, 1-10.

Widhiasthini, N. W. (2023). Kontribusi Perempuan Bali dalam Pengembangan Pariwisata Kreatif di Ubud. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 1-23.

Yanwardhana, E. (2021, Desember 5). *CNBC Indonesia*. Retrieved July 5, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222193439-4-301297/sandi-uno-bali-penyumbang-devisa-terbesar-di-pariwisata-ri/amp>

Yogyakarta, S. S. (2024, September 2). *StiPRAM Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta*. Retrieved February 5, 2025, from StiPRAM Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta: <https://stipram.ac.id/166-pengertian-pariwisata-indonesia-beserta-jenisnya.html>

Zulphiniar Priyandoko, D. S. (2023). POTENSI DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DI DESA JATILUWIH KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.